PENGARUH KINERJA SOSIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN KOMPOSISI DANA PIHAK KETIGA SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Oleh:

FEBY RAHAYU DAMAYANTY
NIM. 18 401 00240

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023

PENGARUH KINERJA SOSIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN KOMPOSISI DANA PIHAK KETIGA SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Oleh:

FEBY RAHAYU DAMAYANTY
NIM. 18 401 00240

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023

PENGARUH KINERJA SOSIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN KOMPOSISI DANA PIHAK KETIGA SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Oleh:

FEBY RAHAYU DAMAYANTY
NIM. 18 401 00240

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Nofinawati, S.E.I, M.A.	Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, M.E
NIP. 19821116 201101 2 003	NIP. 19930227 201903 1 008

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi

a.n. **FEBY RAHAYU DAMAYANTY**

Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, Januari 2023

KepadaYth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsian **FEBY RAHAYU DAMAYANTY yang Berjudul " Pengaruh Kinerja Sosial Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Komposisi Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Intervening".** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam siding munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Nofinawati, SEI., M.A
NIP. 198211162011012003

PEMBIMBING II

Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, M.E
NIP. 199302272019031008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **FEBY RAHAYU DAMAYANTY**
NIM	: 18 401 00240
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: **Pengaruh Kinerja Sosial Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Komposisi Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Intervening**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 03 Januari 2023

Saya yang Menyatakan,



FEBY RAHAYU DAMAYANTY

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: FEBY RAHAYU DAMAYANTY
NIM	: 18 401 00240
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Non-ekslusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Pengaruh Kinerja Sosial Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Komposisi Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Intervening".**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan
Pada tanggal : 03 Januari 2023
Yang menyatakan,



FEBY RAHAYU DAMAYANTY

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQOSYAH SKRIPSI

NAMA	**: FEBY RAHAYU DAMAYANTY**
NIM	**: 18 401 00240**
FAKULTAS	**: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
PROGRAM STUDI	**: PERBANKAN SYARIAH**
JUDUL SKRIPSI	**: PENGARUH KINERJA SOSIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN KOMPOSISI DANA PIHAK KETIGA SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING***

Ketua

Nofinawati, SEI., M.A
NIDN. 2016118202

Sekretaris

Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E
NIDN: 2027029303

Anggota

Nofinawati, SEI., M.A
NIDN. 2016118202

Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E
NIDN: 2027029303

Windari, SE., M.A
NIDN: 2010058301

Aliman Syahuri Zein, M.E.I
NIDN. 2028048201

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	**: Padangsidimpuan**
Hari/Tanggal	**: Sabtu/14 Januari 2023**
Pukul	**: 08.00 WIB s/d Selesai**
Hasil/Nilai	**: Lulus/73,25 (B)**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022
Website:uinsyahada ac.id

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI	**: PENGARUH KINERJA SOSIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN KOMPOSISI DANA PIHAK KETIGA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**
NAMA	**: FEBY RAHAYU DAMAYANTY**
NIM	**: 18 401 00240**
TGL YUDISIUM	**: 28 JANUARI 2023**
IPK	**: 3.46**
PREDIKAT	**: SANGAT MEMUASKAN**

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi
Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 28 Januari 2023
Dekan,

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : **Feby Rahayu Damayanty**
Nim : **18 401 00240**
Judul Skripsi : **Pengaruh Kinerja Sosial Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Komposisi Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel *Intervening***

Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah dikarenakan tidak sesuainya teori dengan fenomena yang terjadi pada bank umum Syariah yang mana teori menyatakan apabila kinerja sosial perbankan Syariah meningkat maka kinerja keuangan juga harus meningkat, tetapi yang terjadi pada bank Syariah ditahun 2021 tidak sesuai dengan teori yang ada. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah komposisi dana pihak ketiga efektif memediasi pengaruh kinerja sosial terhadap keuangan pada perbankan Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui komposisi dana pihak ketiga efektif memediasi pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keungan pada perbankan Syariah.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu akuntansi dan analisis laporan keuangan. Sehubung dengan itu, pendekatan yang digunakan adalah teori-teori yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan. Teori dalam penelitian ini berkaitan dengan teori mengenai Kinerja Sosial, Kinerja Keuangan , Komposisi Dana Pihak Ketiga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitaf penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan yang terdapat pada situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK)dan pada situs laporan keuangan perusahaan . Penelitian ini dilaksanakan pada industri keuangan perbankan syariah. Penelitian menggunakan *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah Evaluasi Nilai Outer Model, Evaluasi Nilai Inner Model, dan Evaluasi Effect Test. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan alat bantu yaitu *path analysis* / PLS 3.0.

Berdasarkan hasil penelitian ini uji Direct Effect dapat disimpulkan bahwa variabel Kinerja Sosial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. variabel Kinerja Sosial tidak berpengaruh terhadap Komposisi Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia. variabel Komposisi Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. Dan variabel Komposisi Dana Pihak Ketiga tidak mampu memperkuat hubungan pengaruh Kinerja Sosial terhadap Kinerja Keuangan di Perbankan Syariah.

Kata Kunci : Kinerja Sosial , Kinerja Keuangan , Komposisi DanaPihak Ketiga

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian "**Pengaruh Kinerja Sosial Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Komposisi Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel *Intervening***". Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiannya yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN AYAHADA Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A., Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan Serta Bapak/Ibu Dosen dan juga *Staff* di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
4. Ibu Nofinawati, M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, M.E., selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku Kepala Perpustakaan dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat

bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

7. Teristimewa kepada ketiga orangtua saya yaitu Ayahanda Suriatno dan Ibunda Komariah Siregar dan uwak saya Aslamiyah Siregar tercinta yang telah menjadi orangtua terhebat yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tiada hentinya. Memberikan dukungan, perhatian, materi demi kesuksesan studi sampai saat ini, dan doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan untuk putrinya ini. Serta abang dan adik saya Riyaldi Ulil Amri dan Nadia Ulpah yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal _Alamiin
8. Terima kasih kepada sahabat terbaik peneliti, Afrah Afifah, ,Irma Sari, Feby Riswana, Fitriya Hairani, Laila Purnama Sari, Nelli Agustina, Hiyasni Ayu, Nanda Silalahi, Nuranita Harahap, Putri Khalija, Saidatari, Adinda fifi, Yuli Ana, Nabila, Tiar Sartika, dan teman-teman di kelas Perbankan Syariah 6 serta seluruh teman-teman Seperjuangan Angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bantuan serta semangat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

Padangsidimpuan, Januari 2023
Peneliti,

FEBY RAHAYU DAMAYANTY
18 401 00240

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	NamaHuruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	a̓	̇	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	a̓l	̇	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	,,ain	.,,.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En ̇

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..‘..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـــَـــ	*Fatḥah*	A	A
ـــِـــ	*Kasrah*	I	I
ـــُـــ	*Ḍommah*	U	U

2. Vokal Rankap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...ي	*fatḥah dan ya*	Ai	a dan i
.....و	*fatḥah dan wau*	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya beruapa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َ....ا...َ..ى	fatḥah dan alif atau ya	ـَـا	a dan garis atas
...ِ..ى	Kasrah dan ya	ـِـي	i dan garis di bawah

ُو....	ḍommah dan wau	–	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasinya untuk *ta mar butah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (tasyidid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال .Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah.*

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariahadalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam

EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi ArabLatin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL .....
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....
ABSTRAK i
KATA PENGANTAR..... ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vi
DAFTAR ISI..... xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR..... xiv

BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Identifikasi Masalah.....9
C. Batasan Masalah.....10
D. Definisi Operasional Variabel.....10
E. Rumusan Masalah.....12
F. Tujuan Penelitian 12
G. Kegunaan Penelitian.....13
H. Sistematika Pembahasan 14

BAB II LANDASAN TEORI 16
1. Kerangka Teori.....16
   a. Kinerja Keuangan 16
      1. Pengertian Kinerja Keuangan 16
      2. Analisis Rasio Keuangan 18
   b. Komposisi Dana Pihak Ketiga 20
      1. Pengertian Komposisi Dana Pihak Ketiga 20
   c. Kinerja Sosial 23
2. Penelitian Terdahulu 29
3. Kerangka Pikir.....34
4. Hipotesis.....35

BAB III Metodologi Penelitian 37
   1. Lokasi Dan Waktu Penelitian 37
   2. Jenis Penelitian.....37
   3. Populasi Dan Sampel 37
      a. Populasi.....37
      b. Sampel.....38
   4. Sumber Data.....39
   5. Teknik Pengumpulan Data.....40
   6. Teknik Analsis Data.....41
      a. Evaluasi Nilai Outer Model 41
      b. Evaluasi Nilai Inner Model 42
      c. Evaluasi Nilai R Square (R^2) 42

BAB IV HASIL PENELITIAN.....43
A. Gambaran Umum Perbankan Syariah Indonesia 43
1. PT. Bank Muamalat Indonesia.....43
2. PT. Bank Victoria Syariah 47
3. PT Bank Bank Syariah Indonesia 48
4. PT. Bank Jabar Banten Syariah.....52
5. PT. Bank Mega Syariah 53
6. PT. Bank Panin Syariah 54
7. PT. Bank BCA Syariah 56
8. PT. Maybank Syariah Indonesia 57
9. PT. Bank Danamon Indonesia.....58
10. PT. Bank Permata.....59
11. PT. Bank CIMB Niaga.....61
12. PT. Bank Sinarmas.....63
13. PT. Bank BPD DKI Jakarta 65
14. PT. Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta.....66
15. PT. Bank BPD Jawa Tengah 67
16. PT. Bank BPD Aceh 69
17. PT. Bank BPD Sumatera Utara.....71
18. PT. Bank BPD Sumatera Barat 72
19. PT. Bank BPD Kalimantan Selatan 74
20. PT. Bank BPD Nusa Tenggara Barat.....77
B. Deskripsi Data Penelitian.....78
1) Kinerja Keuangan 78
2) Dana Pihak Ketiga.....79
3) Kinerja Sosial.....80
C. Hasil Analisis Data.....82
1) Evaluasi Nilai Outer Model 82
a. Convergen Validity 82
b. Construct Validity 84
c. Construct Realibity.....85
2) Evaluasi Nilai Inner Model 86
a. Direct Effect Test 86
b. Indirect Effect Test 88
3) Evaluasi Nilai R Square(R^2) 88
D. Pembahasan Hasil Penelitian 90
E. Keterbatasan Penelitian.....94

BAB V PENUTUP.....95
A. Kesimpulan.....95
B. Saran.....96

DAFTAR PUSTAKA.....
DAFTAR RIIWAYAT HIDUP.....
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel. I.1 Jumlah BUS dan UUS di Indonesia Tahun 2021 2
Tabel. I.2 Definisi Operasional 10
Tabel. II.1 Penelitian Terdahulu.....29
Tabel. III.1 BUS dan UUS di Indonesia 39
Tabel. IV.1 Perkembangan Komposisi DPK Perbankan Syariah 80
Tabel. IV.2 Perkembangan Kinerja Sosial Perbankan Syariah.....81
Tabel. IV.3 Korelasi Antara Variabel Laten AVE.....84
Tabel. IV.4 Korelasi Antara Composite Realibity dan AVE.....85
Tabel. IV.5 Direct Effect Test.....87
Tabel. IV.6 Indirect Effect Test 88
Tabel. IV.7 Evaluasi Nilai R Square (R^2) 89

DAFTAR GAMBAR

Gambar. I.1 Perkembangan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Tahun 2021 4
Gambar. II.1 Kerangka Pikir 35
Gambar. IV.1 Perkembangan Kinerja Keuangan BUS dan UUSTahun 2021 79
Gambar. IV.2 Convergent Validity I 82
Gambar. IV.3 Convergent Validity II..... 83
Gambar. IV.4 Direct Effect Test 86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan aset yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian suatu negara. Di Indonesia sendiri, perkembangan perekonomian tidak bisa dilepaskan dari besarnya peranan lembaga keuangan. Secara umum lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.[1] Salah satu lembaga keuangan yang memberi kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia yaitu perbankan.[2] Fungsinya sama seperti lembaga keuangan lainnya, yaitu sebagai perantara keuangan antara pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana.[3] Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, jenis kegiatan perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).[4]

Adapun pada perbankan syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Peraturan ini setelah pengukuhan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang

[1]Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Revisi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 12.

[2]Irman Firmansyah, "DETERMINANT OF NON PERFORMING LOAN: THE CASE OF ISLAMIC BANK IN INDONESIA," *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 17, no. 2 (29 Januari 2015): 241–58, https://doi.org/10.21098/bemp.v17i2.51.

[3]O. P Simorangkir, *Seluk beluk Bank Komersial*, 5 ed. (Jakarta: Persada Indonesia, 2004).

[4]UU No. 10 Tahun 1998, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN" (Republik Indonesia, 1998), https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf.

perbankan syariah.[5] Akan tetapi diketahui BUS didirikan pertama kali di Indonesia pada tahun 1992 berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Beroperasi Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Sesuai dengan perkembangan perbankan, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disempurnakan dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.[6] Pada tahun 2021, di Indonesia terdapat 12 BUS dan 22 UUS, berikut daftar BUS dan UUS di Indonesia tahun 2021.

Tabel I.1
BUS dan UUS di Indonesia Tahun 2021

BUS	UUS
PT. Bank Muamalat Indonesia	PT Bank Sinarmas
PT. Bank Victoria Syariah	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
PT. Bank Syariah Indonesia	PT BPD DKI
PT. Bank Jabar Banten Syariah	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
PT. Bank Aceh	PT BPD Jawa Tengah
PT. Bank Mega Syariah	PT BPD Jawa Timur, Tbk
PT. Bank Panin Syariah	PT BPD Sumatera Utara
PT. Bank Syariah Bukopin	PT BPD Jambi
PT. BCA Syariah	PT BPD Sumatera Barat
PT. Maybank Syariah Indonesia	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	PT BPD Kalimantan Selatan
PT Bank Permata, Tbk	PT BPD Kalimantan Barat
PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	PD BPD Kalimantan Timur
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
PT Bank OCBC NISP, Tbk	PT BPD Nusa Tenggara Barat

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (2021)

[5]Undang-Undang Perbankan, "Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah" (Republik Indonesia, 2008).

[6]Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah* (Jakarta: Kencana, 2009).

Banyaknya jumlah BUS dan UUS yang berkembang di Indonesia mendorong perekonomian Indonesia sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia, yaitu untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.[7] Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa tujuan pengembangan perbankan syariah adalah terwujudnya sistem perbankan syariah nasional yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.[8]

Mengingat besarnya pengaruh bank syariah terhadap perekonomian suatu negara dan untuk menunjang tujuan tersebut, maka penting bagi perbankan syariah untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Penilaian kinerja bagi manajemen perbankan syariah merupakan penilaian terhadap prestasi yang dicapai. Hal ini penting dilakukan oleh manajemen perbankan syariah dan pihak lain yang berkepentingan untuk mencapai tujuannya masing-masing yang umumnya untuk kemajuan perekonomian di Indonesia.[9] Ukuran dari prestasi yang dicapai dapat dilihat dari *capital adequacy ratio* (CAR), *return on assets* (ROA), *financing deposit ratio*

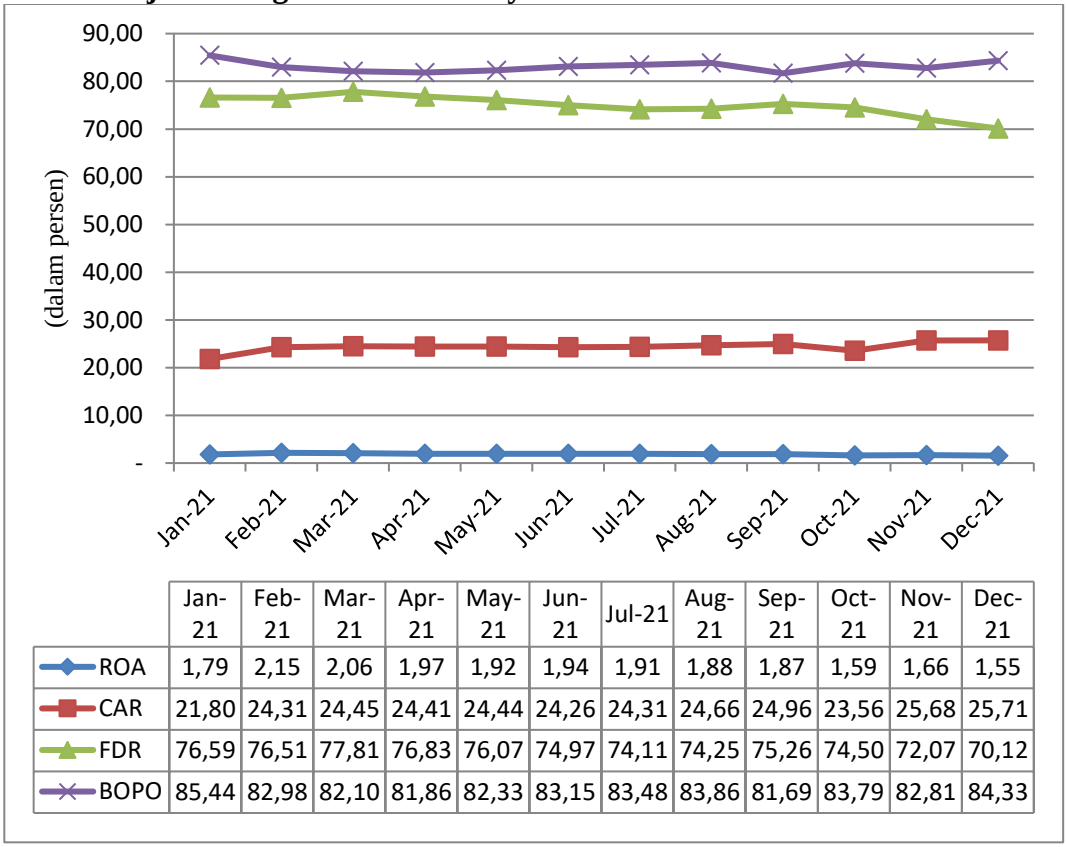
[7]Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah* (Jakarta: Kencana, 2009).

[8]Undang-Undang Perbankan, "Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah."

[9]Riski Agustiningrum, "Analisis Pengaruh CAR, NPL, dan LDR Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan," *E-Jurnal Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 2, no. 8 (2013): 885–902.

(FDR), serta beban operasional dan pendapatan operasional (BOPO). Berikut perkembangan kelima variabel tersebut di perbankan syariah pada tahun 2021.

Gambar I.1
Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2021



	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21
ROA	1,79	2,15	2,06	1,97	1,92	1,94	1,91	1,88	1,87	1,59	1,66	1,55
CAR	21,80	24,31	24,45	24,41	24,44	24,26	24,31	24,66	24,96	23,56	25,68	25,71
FDR	76,59	76,51	77,81	76,83	76,07	74,97	74,11	74,25	75,26	74,50	72,07	70,12
BOPO	85,44	82,98	82,10	81,86	82,33	83,15	83,48	83,86	81,69	83,79	82,81	84,33

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (2021)

Pada gambar tersebut tampak perkembangan kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia tahun 2021 yang kontras terlihat yaitu semakin menurunnya nilai ROA dan hampir menyentuh nilai 1,5%. Hal ini mengindikasikan kalau kinerja perbankan syariah tahun 2021 menurun. Apabila dilihat dari sisi CAR, keuangan perbankan syariah sangat sehat karena nilai berada diatas 12%, meskipun pada bulan Oktober 2021 mengalami penurunan, akan tetapi pada bulan berikutnya mengalami

peningkatan yang signifikan. Serta pada komponen FDR tampak nilai FDR berada beda kisaran 75%, hal ini menandakan kalau bank dalam keadaan sehat. Terakhir, pada komponen BOPO bahwasanya bank syariah sangat sehat dan karena nilainya berada dibawah 94%.

Selain itu, berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 bahwa bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu juga dapat menghimpun dana yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nadzir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).[10] Pelaksanaan fungsi sosial ini juga dapat merefleksikan peranan perbankan syariah dalam pemerataan kesejahteraan ekonomi umat.[11]

Hal tersebut menandakan bahwa tidak semata *profit oriented* namun justru sosial menjadi tujuan utama. Hal ini senada dengan pendapat Syafei yang menyatakan bahwa tujuan bank syariah bukan semata menghasilkan laba maksimum, tapi tetap didorong untuk menghasilkan laba tanpa harus melanggar prinsip syariah dan tanpa harus meninggalkan kontribusinya dalam peningkatan kualitas perekonomian umat.[12] Menurut Al Anjari dalam Rina & Sari bahwa sistem perbankan syariah secara mendasar dibangun untuk berkontribusi dalam rangka pencapaian tujuan sosial ekonomi dari agama

[10]Undang-Undang Perbankan, "Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah."

[11]Dewi Rina dan Ratna Puspita Sari, "Kinerja Keuangan Vs Kinerja Sosial; Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, t.t.

[12]Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006).

Islam.[13] Dusuki dan Dar mengatakan bahwa, pada perbankan syariah tanggung jawab sosial sangat relevan untuk dibicarakan mengingat beberapa faktor berikut; perbankan syariah berlandaskan syariah yang meminta mereka untuk beroperasi dengan landasan moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Selain itu adalnya prinsip atas ketaatan pada perintah Allah dan khalifah. Dan yang terakhir adanya prinsip atas kepentingan umum, terdiri dari penghindaran dari kerusakan dan kemiskinan.[14] Oleh karenanya penting bagi perbankan syariah untuk meningkatkan kinerja di bidang sosial.

Bedoui menyatakan bahwa kinerja adalah sebuah konsekuensi dan hasil dari suatu tujuan atau sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Sementara bagi perencanaan strategi, tujuan adalah alat dalam mengevaluasi kinerja.[15] Evaluasi kinerja menurut Ibrahim, dkk. adalah suatu metode untuk mengukur pencapaian perusahaan berbasis target-target yang disusun di awal.[16] Kinerja sosial yang disediakan dalam berbagai produk serta layanan jasa perbankan syariah yang ada cukup beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, sehingga perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.[17]

---

[13]Rina dan Sari, "Kinerja Keuangan Vs Kinerja Sosial; Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia."

[14]Asyraf Wajdi Dusuki dan Humayon Dar, "Stakeholders' Perceptions of Corporate Social Responsibility of Islamic Banks: Evidence from Malaysian Economy," 2005, 30.

[15]Houssem Eddine Bedoui, "Shari'a-based ethical performance measurement framework," 2012, https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18433.66401.

[16]Shahul Hameed Bin Mohamed Ibrahim dkk., "Alternative Disclosure & Performance Measures," *Department Of Accounting International Islamic University Malaysia*, 2004, 37.

[17]Rina dan Sari, "Kinerja Keuangan Vs Kinerja Sosial; Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia."

Kinerja sosial erat kaitannya dengan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Menurut Suhandari, CSR adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan yang menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.[18] CSR merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan.[19]

Operasi usaha yang paling utama dari suatu perbankan adalah penghimpunan dan penyaluran dana yang berasal dari deposan atau nasabah, pinjaman dari bank lain maupun Bank Indonesia (BI) dan dari sumber lainnya. Kegiatan penghimpunan dana bank sebagian besar bersumber dari simpanan nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito, simpanan nasabah ini disebut sebgai Dana Pihak Ketiga (DPK). Tingginya penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengindikasikan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat, pula akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders* terhadap perbankan syariah. Kepercayaan *stakeholders* akan memberikan dampak positif bagi perkembangan bank itu sendiri. Meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dapat dilakukan perusahaan dengan

[18]Virgowati, "ANALISIS KINERJA SOSIAL PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, dan Muamalat Indonesia)" (ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013).

[19]Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility (CSR)* (Jakarta: Salemba Empat, 2009).

mengembangkan CSR. CSR merupakan klaim agar perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan para pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga untuk kemaslahatan pihak *stakeholders* dalam praktik bisnis yaitu para pekerja, komunitas lokal, pemerintah, LSM, konsumen dan lingkungan. Dalam kasus bank syariah, kegiatan CSR dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk yang ditawarkan. Bertambahnya nasabah yang dimiliki dapat memberikan peningkatan dalam jumlah dana simpanan dari pihak ketiga dan pembiayaan yang disalurkan oleh bank sehingga profitabilitas bank juga mengalami peningkatan.[20]

Beberapa penelitian telah melakukan penelitian antara CSR, DPK dan kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Hikmah dan Lestari bahwasanya pengungkapan *Islamic* CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROE.[21] Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Sidik & Reskino menunjukkan *Islamic* CSR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROE.[22] Selain itu, penelitian Priambodo menyatakan bahwa CSR berpengaruh terhadap positif terhadap DPK. Semakin besar anggaran untuk kegiatan CSR dapat meningkatkan skala pelaksanaan kegiatan CSR sehingga memberikan dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan

[20]Luthfi Azhar Priambodo, "PENGARUH PENGELUARAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP DANA PIHAK KETIGA, JUMLAH PEMBIAYAAN, DAN PROFITABILITAS," t.t., 10.

[21]Faiqotul Hikmah, "PENGARUH KINERJA SOSIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN KOMPOSISI DPK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING" (Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

[22]Ichwan Sidik dan Reskino, "Pengaruh Zakat dan ICSR terhadap Reputasi dan Kinerja," *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 2016, http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA%20XIX%20(19)%20Lampung%202016/makalah/084.pdf.

lebih luas. Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Samina yang menunjukkan hasil adanya korelasi antara pengeluaran CSR dengan DPK.[23]

Adanya kesenjangan hasil temuan penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Penelitian ini mengambil obyek pada 20 observasi yang tergabung pada BUS dan UUS serta penyelesaian analisis menggunakan *path analysis* menggunakan program PLS 3.0. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **"Pengaruh Kinerja Sosial Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Komposisi Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel *Intervening*."**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan uraian dari kumpulan masalah yang terjadi pada latar belakang masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Semakin menurunnya nilai ROA dan hampir menyentuh nilai 1,5%. Hal ini mengindikasikan kalau kinerja perbankan syariah tahun 2021 menurun.
2. Apabila dilihat dari sisi CAR, keuangan perbankan syariah sangat sehat karena nilai berada diatas 12%, meskipun pada bulan Oktober 2021 mengalami penurunan, akan tetapi pada bulan berikutnya mengalami peningkatan yang signifikan.

[23]Quazi Sagota Samina, "Practice of Corporate Social Responsibility in Islamic Banks of Bangladesh," *World Journal of Social Sciences* 2, no. 6 (2012).

3. Pada komponen NPF tampak mengalami penurun hingga bulan Desember yang menandakan perbankan syariah dalam posisi sehat.
4. Pada komponen FDR tampak nilai FDR berada beda kisaran 75%, hal ini menandakan kalau bank dalam keadaan sehat.
5. Pada komponen BOPO bahwasanya bank syariah sangat sehat dan karena nilainya berada dibawah 94%.
6. Tingginya penghimpunan dana pihak ketiga mengindikasikan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat, pula akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders* terhadap perbankan syariah.
7. Kegiatan CSR dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk yang ditawarkan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini relevan dan dapat dipahami, perlu dilakukan pembatasan masalah agar tidak terjadi kesalahan dalam menginterprestasikan topik penelitian. Oleh karena itu, peneliti khusus meneliti dengan fokus pada kinerja sosial, kinerja keuangan dan komposisi dana pihak ketiga pada perbankan syariah di Indonesia dengan cakupan data tahun 2021 menggunakan *path analysis* dengan program PLS 3.0.

D. Definisi Operasional Variabel

Mengingat permasalahan yang luas, dimana kemampuan yang dimiliki peneliti terbatas serta untuk menghindari beberapa kesalahan-kesalahan

dalam memahami masalah. Untuk itu peneliti memberikan defenisi operasional variabel dalam penelitian adalah:

Tabel I.2 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Kinerja Keuangan (Y)	Kinerja keuangan merupakan hasil kegiatan operasional dalam bentuk gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia.[24] Kinerja keuangan adalah kondisi keuangan perbankan syriah.	1. CAR 2. ROA 3. FDR 4. BOPO	Rasio
2	Komposisi Dana Pihak Ketiga (Z)	Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga dan lain-lain dalam bentuk mata uang rupiah dan valuta asing.[25] Komposisi dana pihak ketiga adalah jumlah dana pihak ketiga yang berasal dari giro, tabungan dan deposito perbankan syariah.	1. Giro 2. Tabungan 3. Deposito	Rasio
3	Kinerja Sosial (X)	Kinerja sosial yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedakah, hibah, atau dana sosial lainnya dan	1. CSR	Rasio

[24]Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

[25]Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori Dan Aplikasi*, 4 ed. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002).

		menyalurkannya pada organisasi pengelola zakat.[26] Kinerja sosial adalah kegiatan sosial yang diusung oleh pihak perbankan syariah.		

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah?
2. Apakah terdapat pengaruh komposisi dana pihak ketiga terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah?
3. Apakah terdapat pengaruh kinerja sosial terhadap komposisi dana pihak ketiga pada perbankan syariah?
4. Apakah komposisi dana pihak ketiga efektif memediasi pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah.
2. Untuk pengaruh komposisi dana pihak ketiga terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah.

[26]Undang-Undang Perbankan, "Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah."

3. Untuk mengetahui pengaruh kinerja sosial terhadap komposisi dana pihak ketiga pada perbankan syariah.
4. Untuk mengetahui komposisi dana pihak ketiga efektif memediasi pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah.

G. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berjudul pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan dengan komposisi dana pihak ketiga sebagai variabel *intervening* diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

   Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan baru bagi peneliti dan melengkapi sebagai persyaratan dan tugas yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

2. Bagi UIN SYAHADA Padangsidimpuan

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pada UIN SYAHADA Padangsidimpuan sebagai bahan untuk peneliti selanjutnya.

3. Bagi Perbankan Syariah

   Hasil penelitian ini diharapakan bagi manajemen operasional perusahan untuk selalu memperhatikan kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kinerja keuangan sehingga kepercayaan nasabah terhadap

bank akan tetap terjaga dengan komposisi dana pihak ketiga yang semakin meningkat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tambahan tentang penelitian pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan dengan komposisi dana pihak ketiga sebagai variabel *intervening*.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam penelitian ini, peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab dalam tiap-tiap bab tersebut terdiri dari beberapa sub bagian. Sistematika dalam penelitian ini adalah:

Bab I tentang pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II tentang landasan teori menjelaskan teori-teori yang melandasi penelitian dan menjadi dasar acuan teori yang relevan untuk menganalisis penelitian. Terdiri dari kerangka teori, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

Bab III tentang metode penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV tentang Hasil penelitian menjelaskan pembahasan dan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum perusahaan, hasil uji analisis serta pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V menjelaskan penutup dari keseluruhan isi skripsi yang membuat kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah disertai dengan saran-saran. Melalui kesimpulan ini kita bisa mengetahui apakah penelitian yang kita lakukan berhasil atau tidak. Serta saran yang ada dalam bab ini bisa membantu untuk perbaikan ke penelitian selanjutnya.

BAB II

Landasan Teori

1. Kerangka Teori

a. Kinerja Keuangan

1) Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal kerja, likuiditas, dan profitabilitas perusahaan.[27] Kinerja keuangan perusahaan merupakan alat ukur untuk menilai kesehatan perusahaan. Jika kinerja keuangannya baik dan memenuhi standar rata-rata industri berarti perusahaan tersebut berhasil dalam melaksanakan strategi usahanya.

Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap keuangan perusahaan menyangkut review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

[27]Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, 239.

Dengan demikian prosedur analisis terhadap kinerja keuangan yang dilakukan meliputi tahap-tahap berikut:[28]

a) Review data laporan, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan melakukan penyesuaian data laporan keuangan terhadap berbagai hal, baik sifat atau jenis perusahaan yang melaporkan maupun sistem akuntansi yang berlaku. Kegiatan me-review data merupakan jalan menuju suatu hasil analisis yang memiliki tingkat pembiasan yang relatif kecil.
b) Melakukan perhitungan dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis, seperti metode perbandingan, persentase perkomponen, analisis rasio keuangan, maupun metode lainnya sesuai dengan tujuan analisis.
c) Membandingkan dan mengukur hasil perhitungan yang telah dilakukan, baik dengan perusahaan sejenis atau dalam perusahaan yang sama tetapi dalam periode atau tahun yang berbeda. Dengan cara ini akan diketahui hasil yang dicapai oleh perusahaan, apakah lebih baik dari usaha yang sejenis, atau apakah mengalami kemajuan atau kemunduran.
d) Menginterpretasikan hasil dari perbandingan/pengukuran dengan kaidah teoritis yang berlaku. Hasil interpretasi mencerminkan keberhasilan maupun permasalahan apa yang dicapai perusahaan dalam pengelolaan keuangan.

[28]Jumingan, 240.

e) Dengan memahami masalah keuangan yang dihadapi, perusahaan akan menempuh solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

Berdasarkan prosedur analisis di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis kinerja keuangan hal yang perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan perusahaan adalah dengan menghitung tingkat kinerja tersebut dengan menggunakan metode-metode yang sesuai dengan tujuan dilakukannya analisis tersebut.

2) Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.[29] Sedangkan menurut Kasmir, rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antar satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.[30]

[29]Jumingan, 242.
[30]Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 104.

Jadi, analisis rasio keuangan adalah alat analisis keuangan yang dibuat dengan membandingkan angka dalam akun tahunan dengan menentukan hubungan antara nilai item neraca dan hasil perusahaan. Hasil dari rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode apakah dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. Setiap rasio memiliki tujuan, kegunaan dan mengandung arti tertentu. Dan karena perbedaan tujuan yang ingin dicapai, maka analisis rasio keuangan memiliki berbagai ragam. Tidak ada satupun analisa rasio keuangan yang dapat menjawab semua kepentingan perusahaan, untuk itu dikembangkan empat kelompok rasio keuangan sebagai berikut:[31]

a) Rasio Likuiditas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya.
b) Rasio Aktivitas, yaitu rasio yang menunjukkan sejauh mana efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk memperoleh penjualan.

[31]Sartono, *Manajemen Keuangan Teori Dan Aplikasi*, 114.

c) *Financial Leverage Ratio*, yaitu rasio yang menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik itu jangka pendek maupun jangka pandang.

d) Rasio Profitabilitas, yaitu rasio yang dapat mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, aset, maupun laba bagi modal sendiri.

b. Komposisi Dana Pihak Ketiga

1) Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga dan lain-lain dalam bentuk mata uang rupiah dan valuta asing. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasi dari sumber dana ini. Dana simpanan (deposit) masyarakat merupakan jumlah dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Untuk menopang kegiatan bank sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan, bank harus terlebih dahulu menghimpun dana sehingga dari selisih bagi hasil, marjin dan bonus tersebutlah bank memperoleh keuntungan.[32]

Penghimpunan dana dari sumber ini relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Mudah dikarenakan asal dapat

[32]Kasmir, *Dasar- Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 68.

memberikan tingkat bagi hasil dan bonus (*fee*) yang relatif tinggi dan dapat memberikan fasilitas yang menarik seperti hadiah dan pelayanan yang memuaskan menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit. Keuntungan lain yang diperoleh bank adalah dana dari sumber ini tidak terbatas. Namun, kerugiannya adalah sumber dana dari dana pihak ketiga ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan sumber penghimpunan dana lainnya.[33]

Dana yang berasal dari masyarakat luas adalah dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti giro, deposito dan tabungan.[34] Adapun akad yang ditawarkan pada penghimpunan dana pihak ketiga adalah akad *wadī'ah* dan *muḍārabah*. *Wadī'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi*) yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpan (*mustawda*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan kebutuhannya dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.[35]

Wadī'ah terdiri dari dua jenis yaitu *wadī'ah yad al-amānah* dan *wadī'ah yad damānah*. *Wadī'ah yad al-amānah* merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima

[33]Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2008).

[34]Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2005), 45.

[35]Ascarya *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 42.

titipan dimana barang yang dititipkan harus dijaga dan dipelihara dan tidak boleh dimanfaatkan. Sedangkan *wadī'ah yad damānah* merupakan akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan (bank syariah). Bank syariah sebagai penerima titipan diperbolehkan untuk memanfaatkan barang titipan dan wajib mengembalikan barang yang dititipkan kapan pun si penitip memintanya. Dalam hal ini bank syariah sebagai penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.[36]

Dalam aplikasi perbankan syariah, simpanan giro dapat ditawarkan dengan menggunakan akad *wadī'ah yad damānah*. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisā Ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.[37]

Kata-kata yang menjelaskan tentang akad *wadī'ah* adalah *an tuaddūl amānāti ilā ahlihā*. Menyangkut ayat ini Allah SWT. memerintahkan kepada hambanya untuk menunaikan amanat-amanat

[36]Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 60–63.

[37]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

secara sempurna dan tepat waktu kepada pemiliknya, yakni yang berhak menerimanya baik amanat Allah kepada kamu maupun amanat manusia, betapapun banyaknya yang diserahkannya kepada kamu. Ayat di atas ketika memerintahkan menunaikan amanat ditekankannya bahwa amanat tersebut harus ditunaikan kepadanya (*ahlihā*) yakni pemiliknya.[38] Ayat ini dapat dikaitkan dengan pengaplikasian produk tabungan dengan akad *wadī'ah* di bank syariah. *Wadī'ah* terbagi 2 yaitu *wadī'ah yad damānah* dan *wadī'ah yad al-amānah.* Dalam akad *wadī'ah* ini bank diberi amanah oleh nasabah untuk menyimpan dan mengelola atau memelihara dananya di bank syariah.

c. Kinerja Sosial

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada pasal 4 dinyatakan, bahwa selain berkewajiban menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedakah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya pada organisasi pengelola zakat. Selain itu Bank Syariah dan UUS juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).[39]

[38]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah: Pesan dan Kesan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

[39]Undang-Undang Perbankan, "Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah."

Rizal Yaya menjelaskan bahwa dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu:[40]

1) Manajer Investasi, dalam fungsi ini bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana;
2) Investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor–sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah;
3) Sosial, ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) dan instrumen qardhul hasan;
4) Jasa Keuangan, fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh 6 bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain sebagainya.

Menurut Antonio, menurutnya bank syariah selain memiliki fungsi sebagai pengelola investasi dan penyedia jasa-jasa keuangan

[40]Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer berdasarkan PAPSI 2013*, 2 ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2016).

juga memiliki jasa sosial. Dalam padangannya, konsep perbankan Islam mengharuskan bank syariah melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana pinjaman kebaikan (*qard*), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi menurutnya, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank Islam memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan meyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.[41]

Evaluasi kinerja menurut Ibrahim, dkk., adalah satu metode untuk mengukur pencapaian perusahaan berbasis pada target-target yang disusun diawal.[42] Hal ini menjadi bagian penting kontrol pengukur yang dapat membantu perusahaan memperbaiki kinerjanya dimasa depan. Dalam Islam keberadaan evaluasi kinerja sangat dianjurkan. Konsep mushabahah merupakan representasi yang mendasar dari evaluasi kinerja, yang bisa diterapkan untuk individu atau perusahaan. Hal ini kemudian menjadi landasan filosofis penting mengapa perlu dilakukan evaluasi kinerja bagi bank syariah, termasuk kinerja sosialnya. Proses untuk mengevaluasi kinerja dapat dilakukan pada berbagai bidang pekerjaan, baik itu dalam bidang organisasi non-profit maupun organisasi profit.

Menurut Pangaribuan dan Yahya dalam Virgowati menjelaskan penilaian kinerja merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu

[41]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : dari teori ke praktik*, 1 ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 201–2.

[42]Ibrahim dkk., "Alternative Disclosure & Performance Measures."

tercapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya dan bagaimana tindak lanjut atas perbedaan tersebut. Jadi, nampak jelas bahwa dalam melakukan evaluasi terhadap suatu entitas apapun dibutuhkan tolak ukur tertentu sebagai acuan. Selain itu, yang juga mendasar karena karakter khas bank syariah yang memiliki fungsi sosial maka alat ukur penilaian perlu dikembangkan secara berbeda. Hal ini untuk mengakomodasi kekhususan model operasi bank syariah tersebut.[43]

Dalam penelitian ini menggunakan *coorporate social responsibility* (CSR) sebagai indikator yang mewakili kinerja sosial bank umum syariah. CSR didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan kepada para *stakeholder*-nya, terutama dengan masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. Suatu perusahaan dapat dikatakan bertanggung jawab secara sosial, apabila memiliki visi atas kinerja operasional yang tidak hanya merealisasikan profit, akan tetapi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau lingkungan sosialnya.[44]

CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi inhern dari ajaran islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam (*Maqashid al syariah*) adalah maslahah sehingga bisnis adalah upaya untuk

[43]Virgowati, "ANALISIS KINERJA SOSIAL PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, dan Muamalat Indonesia)."

[44]Hamdani, *Good Corporate Governance: Tinjauan Etia dan Praktik Bisnis* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), 174.

menciptakan maslahah, bukan sekedar mencari keuntungan. Begitu juga aktivitas CSR di perbankan syariah pun melekat secara inhern sebagai konsekuensi kebersandaran bank syariah pada ajaran Islam. Berbeda dengan bank konvensional tidak dapat dipisahkan secara dikotomis antara orientasi bisnis dengan orientasi sosialnya.

Aktivitas-aktivitas sosial dari bank syariah merupakan nilai tambah (*add value*) yang dapat berimplikasi pada meningkatnya profitabilitas jangka panjang dan *goodwill* yang diperoleh dari citra positif dari bisnis yang dijalankan serta meningkatnya kepercayaan stakeholder terhadap kinerja bank syariah. Jika CSR tidak dilaksanakan maka akan terdapat lebih banyak biaya yang harus ditanggung perusahaan. Sebaliknya jika melaksanakan CSR dengan baik dan aktif bekerja keras mengimbangi hak-hak dari semua stakeholders berdasarkan kewajaran, martabat, dan keadilan, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil, akan benar-benar member manfaat dalam jangka panjang, terutama bagi perusahaan, masyarakat, dan pemerintah.[45]

1) Manfaat bagi perusahaan

Tanggung jawab sosial akan memunculkan citra positif dari masyarakat, karena keberadaan perusahaan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Selain membantu ekonomi masyarakat, perusahaan juga dianggap mampu

[45]Hamdani, 175.

membantu dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik di masa mendatang. Akibatnya, perusahaan justru akan memperoleh tanggapan yang positif setiap kali akan menawarkan sesuatu kepada masyarakat. Perusahaan tidak saja dianggap sekedar menawarkan produk untuk dibeli masyarakat, tetapi juga dianggap menawarkan sesuatu yang akan membawa perbaikan bagi masyyarakat.

2) Manfaat bagi masyarakat

Selain mendapatkan perhatian perusahaan, manfaat tanggung jawab sosial bagi masyarakat juga akan mendapatkan pandangan baru bahwa mengenai hubungan perusahaan dan masyarakat yang selama ini hanya sekedar dipahami sebagai hubungan produsen dan konsumen, atau hubungan penjual dan pembeli saja. Saat ini hubungan masyarakat dengan dunia bisnis tidak lagi dipahami sebagai hubungan antar pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang tereksploitasi, tetapi hubungan kemitraan dalam membangun hubungan masyarakat yang lebih baik.

3) Manfaat bagi pemerintah

Pemerintah tidak hanya sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis, akan tetapi pemerintah dapat memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar. Pemerintah sebagai pihak yang mendapat legitimasi

untuk mengubah tatanan masyarakat kearah yang lebih baik. Sebagai tugas pemerintah dapat dijalankan oleh anggota masyarakat, dalam hal ini perusahaan atau organisasi bisnis.

2. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang terkait pada variabel, teori dan metode yang dipakai dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel kajian penelitian terdahulu.

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Siregar, dkk, JIFTECH (2022)	*The Effect Of Inflation Level And Bi-7 Day Repo Rate On Mudhrabah Deposits In Sharia Commercial Banks Period 2017-2019*	Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji parsial (uji t) inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito mudhar bah sedangkan uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F) adalah variabel inflasi dan Bi-7 Day Repo Rate berpengaruh signifikan terhadap variabel Deposito Mudharbah pada Bank Umum Syariah 2017-2019.[46]
2	Hikmah, Skripsi, UIN Malang (2019)	Pengaruh Kinerja Sosial Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Komposisi DPK Sebagai Variabel *Intervening*	Zakat berpengaruh terhadap profitabilitas, ICSR berpengaruh terhadap profitabilitas, reputasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.[47]

[46]Budi Gautama Siregar, Nurul Izzah, dan Damri Batubara, "The Effect Of Inflation Level And Bi-7 Day Repo Rate On Mudhrabah Deposits In Sharia Commercial Banks Period 2017-2019," *JIFTECH* 1, no. 1 (2022), http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/jiftech/article/view/5020.

[47]Hikmah, "PENGARUH KINERJA SOSIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN KOMPOSISI DPK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING."

3	Mubarak, dkk, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam (2019)	Pengungkapan Kinerja Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Menggunakan *Islamic Social Reporting Index*	Dari hasil penilaian menggunakan indeks ISR diketahui bahwa BSM menempati nilai pengungkapan tertinggi pada periode 2015-2017. Rata-rata per tahun menunjukkan bahwa pelaporan kinerja sosial Bank Umum Syariah cenderung meningkat dengan predikat baik.[48]
4	Hutagalung, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman (2019)	Pengaruh *Non Performing Financing* Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap *Return On Asset* Dimoderasi Oleh Variabel Inflasi	Hasil dari penelitian ditemukan bahwa berdasarkan uji t variabel NPF memiliki pengaruh yang signifikan dan berhubungan positif terhadap ROA. Sedangkan untuk variabel DPK memiliki pengaruh yang signifikan dan berhubungan negatif terhadap ROA. Sementara itu variabel Inflasi tidak dapat memoderasi pengaruh NPF terhadap ROA dan juga tidak mampu memoderasi pengaruh DPK terhadap ROA pada periode 2011 hingga 2015.[49]
5	Nofinawati, Jurnal Riset Ekonomi (2018)	Pengaruh Inflasi, BI Rate, Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dana Pihak Ketiga (Dpk) Pada Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2012-2017	Peningkatan DPK dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain Inflasi, BI Rate dan Nilai Tukar Rupiah. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan Inflasi dan BI Rate yang tidak dibarengi dengan penurunan DPK.[50]

[48]Darihan Mubarak, Sigit Pramono, dan Ai Nur Bayinah, "Pengungkapan Kinerja Sosial Perbankan Syariah di Indonesia," *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN ISLAM* 7, no. 1 (26 Juni 2019): 37–58, https://doi.org/10.35836/jakis.v7i1.65.

[49]Muhammad Wandisyah R Hutagalung, "Pengaruh Non Performing Financing Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Return On Asset Dimoderasi Oleh Variabel Inflasi," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 7, no. 1 (2019), https://doi.org/10.24952/masharif.v7i1.1702.

[50]Nofinawati, "PENGARUH INFLASI, BI RATE, DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DANA PIHAK KETIGA (DPK) PADA PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

6	Reni dan Sari, Jurnal Artikel, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah (2017)	Kinerja Keuangan vs Kinerja Sosial: Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukan secara parsial variabel *Return of Equity* (ROE) dan *Return of Assets* (ROA) berpengaruh terhadap *Mudharabah Musyarakah Ratio* (MMR), sedangkan variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak terdapat pengaruh terhadap variabel *Mudharabah Musyarakah Ratio* (MMR). Variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return of Equity* (ROE), dan *Return of Assets* (ROA) secara parsial tidak terdapat pengaruh pada variabel *Qardh Ratio* (QR).[51]
7	Sidik dan Reskino, Simposium Nasional Akuntansi XIX (2016)	Pengaruh Zakat dan ICSR terhadap Reputasi dan Kinerja	Zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap reputasi bank syariah, ICSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap reputasi bank syariah, zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank syariah, sedangkan ICSR tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah.[52]
8	Amirah & Raharjo, *Proceeding Call for Syariah Paper* (2014)	Pengaruh Alokasi Dana Zakat Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah	Zakat berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah terhadap Dana Pihak Ketiga sebagai variabel mediasi. Hasil ini menunjukkan bahwa bank syariah telah menerapkan strategi pemasaran yang efektif melalui penyaluran zakat yang

TAHUN 2012-2017," *Jurnal Riset Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2018), http://dx.doi.org/10.31958/imara.v2i2.1252.

[51]Rina dan Sari, "Kinerja Keuangan Vs Kinerja Sosial; Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia."

[52]Sidik dan Reskino, "Pengaruh Zakat dan ICSR terhadap Reputasi dan Kinerja."

			dilakukan secara simultan dalam rangka *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam menarik investor untuk menanamkan dananya di bank syariah.[53]

Adapun persamaaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu:

a. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian oleh Siregar, dkk., yaitu sama-sama meneliti variabel kinerja keuangan. Adapun perbedaan terletak pada objek penelitian, yaitu penelitian tersebut meneliti tentang *The Effect Of Inflation Level And Bi-7 Day Repo Rate On Mudhrabah Deposits In Sharia Commercial Banks Period 2017-2019* sedangkan penelitian ini mengkaji variabel kinerja sosial, kinerja keuangan dan komposisi DPK.
b. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian oleh Hikmah yaitu sama-sama meneliti variabel kinerja keuangan dan komposisi DPK. Adapun perbedaan terletak pada objek penelitian, yaitu penelitian tersebut meneliti tentang Pengaruh Kinerja Sosial Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Komposisi DPK Sebagai Variabel *Intervening* sedangkan penelitian ini mengkaji variabel kinerja sosial, kinerja keuangan dan komposisi DPK.

[53]Amirah dan Teguh Budi Raharjo, "PENGARUH ALOKASI DANA ZAKAT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH," *Proceeding Call for Syariah Paper*, 2014, http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/per/article/download/369/366.

c. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian oleh Mubarak, dkk. yaitu sama-sama meneliti variabel kinerja sosial. Adapun perbedaan terletak pada objek penelitian, yaitu penelitian tersebut meneliti tentang Pengungkapan Kinerja Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Menggunakan *Islamic Social Reporting Index* sedangkan penelitian ini mengkaji variabel kinerja sosial, kinerja keuangan dan komposisi DPK.
d. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian oleh Hutagalung yaitu sama-sama meneliti variabel ROA. Adapun perbedaan terletak pada objek penelitian, yaitu penelitian tersebut meneliti tentang Pengaruh *Non Performing Financing* Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap *Return On Asset* Dimoderasi Oleh Variabel Inflasi sedangkan penelitian ini mengkaji variabel kinerja sosial, kinerja keuangan dan komposisi DPK.
e. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian oleh Nofinawati yaitu sama-sama meneliti variabel DPK. Adapun perbedaan terletak pada objek penelitian, yaitu penelitian tersebut meneliti tentang Pengaruh Inflasi, BI Rate, Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2012-2017, sedangkan penelitian ini mengkaji variabel kinerja sosial, kinerja keuangan dan komposisi DPK.
f. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian oleh Reni dan Sari yaitu sama-sama meneliti variabel kinerja sosial dan keuangan.

Adapun perbedaan terletak pada objek penelitian, yaitu penelitian tersebut meneliti tentang Kinerja Keuangan vs Kinerja Sosial; Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia sedangkan penelitian ini mengkaji variabel kinerja sosial, kinerja keuangan dan komposisi DPK.

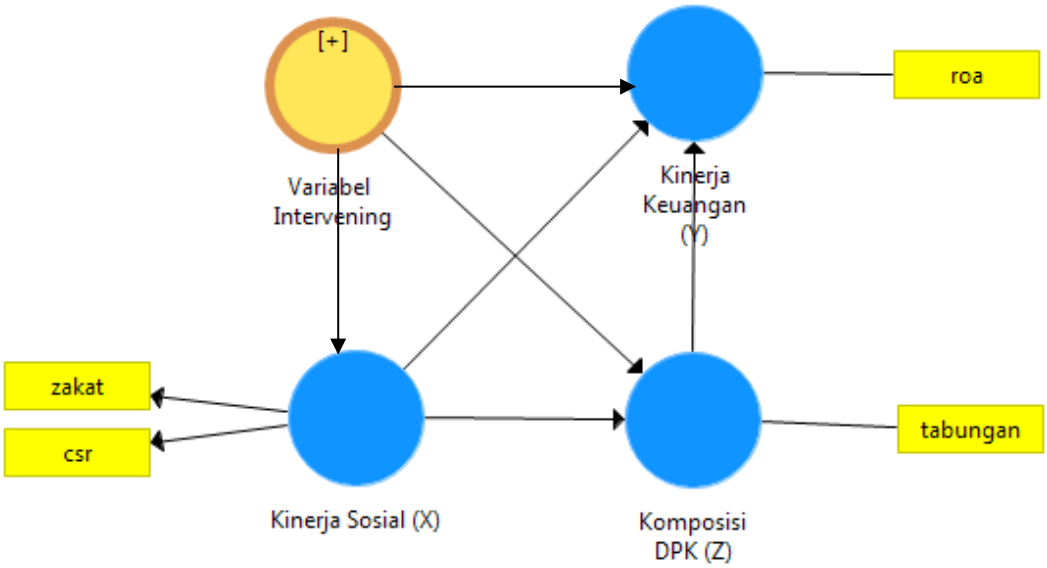
g. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian oleh Sidik dan Reskino yaitu sama-sama meneliti variabel kinerja sosial dan keuangan. Adapun perbedaan terletak pada objek penelitian, yaitu penelitian tersebut meneliti tentang Pengaruh Zakat dan ICSR terhadap Reputasi dan Kinerja sedangkan penelitian ini mengkaji variabel kinerja sosial, kinerja keuangan dan komposisi DPK.

h. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian oleh Amirah dan Raharjo yaitu sama-sama meneliti variabel kinerja sosial dan keuangan. Adapun perbedaan terletak pada objek penelitian, yaitu penelitian tersebut meneliti tentang Pengaruh Alokasi Dana Zakat Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah sedangkan penelitian ini mengkaji variabel kinerja sosial, kinerja keuangan dan komposisi DPK.

3. Kerangka Pikir

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan penjabaran teori tentang masing-masing variabel, struktur penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

Gambar II. 1
Kerangka Pikir



Berdasarkan gambar 2 diatas, dapat dilihat bahwa variabel Kinerja Sosial (X) secara parsial mengarah kepada variabel Kinerja Keuangan (Y), dan variabel Kinerja Sosial (X) seacara parsial mengarah kepada variabel Komposisi DPK (Z). Begitu juga dengan variabel Komposisi DPK (Z) secara parsial mengarah kepada variabel Kinerja Keuangan (Y). Dan begitupula variabel Intervening secara parsial mengarah kepada variabel Komposisi DPK (Z), Kinerja Keuangan, dan Kinerja Soaial.

4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan

pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.[54] Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1: Terdapat pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah.

H_2: Terdapat pengaruh komposisi dana pihak ketiga terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah.

H_3: Terdapat pengaruh kinerja sosial terhadap komposisi dana pihak ketiga pada perbankan syariah.

H_4: Komposisi dana pihak ketiga efektif memediasi pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah.

[54]Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B* (Bandung: Alfabeta, 2012).

BAB III

Metode Penelitian

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada perbankan syariah yang termasuk dalam Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia pada tahun 2021.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah data yang diukur dalam satuan skala numerik (angka).[55] Yaitu menggunakan alat bantu statistik paling utama dalam memberikan gambaran atas suatu peristiwa atau gejala, baik statistik deskriptif maupun inferensial dengan menguji hipotesis menggunakan pendekatan regresi linier sederhana.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, dapat berupa manusia, wilayah geografis, waktu, organisasi, kelompok, lembaga, buku, kata-kata, surat kabar, majalah dan sebagainya. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek, tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki objek yang diteliti.[56] Populasi penelitian ini yaitu bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) di

---

[55]Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 145.

[56]Syukur Kholil, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Citapustaka Media, 2006), hlm. 68.

Indonesia. Adapun jumlah Bank Umum Syariah terdiri dari 11 bank Syariah dan jumlah Unit Usaha Syariah terdiri dari 9 Unit Usaha Syariah.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.[57] Untuk menentukan sampel-sampel pada penelitian ini, peneliti menggunakan *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.

Kritera yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah :

a. Berdasarkan laporan tahunan (*annual report*) yang lengkap periode 2021 pada website masing-masing Bank Umum Syariah.
b. Bank Umum Syariah yang memiliki kelengkapan data variabel yang diteliti, yaitu kinerja keuangan, komposisi dana pihak ketiga, dan kinerja sosial dengan menggunakan beberapa indikator, yaitu ROA,Tabungan,Zakat, dan CSR.

Adapun jumlah sampel penelitian ini terdiri 9 Bank Umum Syariah 11 Unit Usaha Syariah. Berikut daftar BUS dan UUS yang termasuk sampel dalam penelitian ini.

Tabel III. 1
BUS dan UUS di Indonasia Tahun 2021

No	BUS	No	UUS
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	12	PT Bank Sinarmas
2	PT. Bank Victoria Syariah	13	PT BPD DKI
3	PT. Bank Syariah Indonesia	14	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
4	PT. Bank Jabar Banten Syariah	15	PT BPD Jawa Tengah, Tbk
5	PT. Bank Mega Syariah	16	PT BPD Aceh
6	PT. Bank Panin Syariah	17	PT BPD Sumatera Utara
7	PT. BCA Syariah	18	PT BPD Sumatera Barat
8	PT. Maybank Syariah Indonesia	19	PT BPD Kalimantan Selatan
9	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	20	PT BPD Nusa Tenggara Barat
10	PT Bank Permata, Tbk		
11	PT Bank CIMB Niaga, Tbk		

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021)

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu apabila peneliti mengumpulkan data dari orang lain, bukan dari sumber pertamanya.[58]. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari laporan keuangan yang terdapat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui situs www.ojk.go.id., dan terdapat juga pada situs bankmuamalat.co.id, bankvictoriasyariah.co.id, banksyariahindonesia, bjbsyariah.co.id, bankmegasyariah.co.id, bankpaninsyariah.co.id, bcasyariah.co.id, maybank.co.id, bankdanamonindonesia, .bankpermata, bankCIMBNiaga.co.id, banksinarmas.co.id, bankDKIjakarta.co.id, BankBPDDaerahIstimewaYogyakarta.co.id, bankBPDjawatengah.co.id, bankAceh.co.id, bankSumaterautara.co.id, bankSumaterabarat.co.id

[58]Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2016), 16–17.

,bankKalimantanselatanco.id, bankNusatenggarabarat.co.id,. Dan data yang digunakan adalah data cross section yang digunakan merupakan data pada tahun 2021.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan harapan, maka teknik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Adapun studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari skripsi, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan perbankan syariah atau buku-buku yang terkait dengan variabel penelitian yang dicantumkan dalam landasan teori.

b. Dokumentasi

Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan. Dalam penelitian data diperoleh dari Otoritas Jasa (OJK) dan, bankmuamalat.co.id, bankvictoriasyariah.co.id,banksyariahindonesia, bjbsyariah.co.id, bankmegasyariah.co.id, bankpaninsyariah.co.id, bcasyariah.co.id, maybank.co.id, bankdanamonindonesia, .bankpermata, bankCIMBNiaga.co.id, banksinarmas.co.id, bankDKIjakarta.co.id, BankBPDDaerahIstimewaYogyakarta.co.id, bankBPDjawatengah.co.id, bankAceh.co.id, bankSumaterautara.co.id, bankSumaterabarat.co.id ,bankKalimantanselatanco.id, bankNusatenggarabarat.co.id,.

6. Teknik Analisis Data

Dari hasil pengumpulan data yang terkumpul. Maka dilakukan pengolahan data atau analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah metode *path analysis* menggunakan PLS 3.0. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Evaluasi Nilai *Outer Model*

Evaluasi Nilai *outer model* terdiri dari loading factor, AVE (*average variance extracted* dan nilai alpha). *Loading factor* merupakan nilai yang dihasikan oleh variabel manifest, dimana nilai tersebut menggambarkan seberapa baik variabel manifest tersebut berkontribusi terhadap variabel laten. Nilai loading factor dianggap baik minimal 0,4 artinya variabel manifest tersebut betul-betul merefleksikan variabel laten. Sementara itu nilai AVE menggambarkan jumlah rata-rata varian dari indikator yang dijelaskan oleh hubungannya dengan variabel laten. AVE menunjukkan nilai validitas diskriminan (*discriminat validity*), dimana nilai AVE yang baik minimal 0,4 atau nilai akar kuadrat dari AVE lebih besar dibandingkan dengan korelasi antar variabel. Sedangkan nilai alpha menunjukkan nilai reliabilitas atau internal consistency, dimana nilai yang dianjurkan adalah 0,6. [59]

[59]Hair.

b. Evaluasi Nilai *Inner Model*

Evaluasi nilai *inner model* merupakan evaluasi terhadap persamaan struktural yang dihasilkan dari model yang dibangun. Banyaknya persamaan struktural yang dihasilkan tergantung dari seberapa komplek model yang dibangun. Semakin komplek model yang dibangun maka semakin banyak pula persamaan struktural yang dihasilkan. Evaluasi terhadap *inner model* tersebut dengan milihat nilai koefisien jalur yang dihasilkan dan juga nilai *critical region* (CR). Hal ini bisa dilihat dari nilai CR yang dihasilkan dari setiap hubungan melebihi angka 1,96 dengan signifikan pada level alpha 5%.[60]

c. Evaluasi Nilai R Square (R^2)

Evaluasi nilai R Square (R^2) bagi variabel laten endogen merupakan bentuk evaluasi untuk mengetahui seberapa besar varian dalam model mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel endogen. Besarnya nilai R^2 tergantung dari seberapa komplek model yang dibangun dalam suatu penelitian. Maka nilai R^2 akan semakin besar. Begitu juga jika model yang dibangun didalam penelitian sederhana, maka nilai R^2 juga akan kecil. Nilai R^2 maksimum bernilai 1, artinya tidak ada lagi variabel eksogen yang bisa mempengaruhi variabel endogen.[61]

[60]Hair.
[61]Hair.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perbankan Syariah di Indonesia

1. Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara Syariah. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah, dibuat dihadapan Yudo Paripurno, SH, Notaris, di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 tambahan No. 1919A.

Anggaran Dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir perubahan Anggaran Dasar yang dirumuskan pada Akta No. 18 tanggal 28 Januari 2022 dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 31 Januari 2022 No. AHU-AH.01.03-0070769 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 3 Februari 2022

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 004853. BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Perseroan telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 131/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya memberikan izin kepada Perseroan untuk dapat melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Bank Muamalat merupakan perusahaan publik yang sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan secara resmi beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR tentang Penunjukan PT Bank Muamalat Indonesia Menjadi Bank Devisa tanggal 27 Oktober 1994.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-79/MK.03/1995 tanggal 6 Februari 1995, Perseroan secara resmi ditunjuk sebagai Bank Devisa Persepsi Kas Negara. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-9383/MK.5/2006 tanggal 28

Desember 2006, Perseroan memperoleh status Bank Persepsi yang mengizinkan Perseroan untuk menerima setoran-setoran pajak. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2013, Perseroan telah menjadi peserta program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana tercantum dalam Surat Lembaga Penjamin Simpanan No. S.617/DPMR/VII/2013 perihal Kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan. Perseroan lalu ditetapkan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengelola Keuangan Haji No. 4/BPKH.00/2018 tanggal 28 Februari 2018.

BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Sukuk Subordinasi Mudharabah, Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk Shar-e yang diluncurkan pada 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.

Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada 2011 berhasil memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk itu menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak

sejarah penting di industri perbankan syariah. Seiring kapasitas Bank yang semakin besar dan diakui, BMI kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya tidak hanya di seluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri. Pada 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 239 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 568 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 51 unit Mobil Kas Keliling.

BMI melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank Syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus merealisasikan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui, baik secara nasional maupun internasional. Kini, dalam memberikan layanan terbaiknya, BMI beroperasi bersama beberapa entitas asosiasi dan afiliasinya yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Muamalat Institute yaitu lembaga yang mengembangkan, mensosialisasikan dan memberikan pendidikan mengenai sistem ekonomi syariah kepada

masyarakat, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

2. Bank Victoria Syariah

Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertaman kalinya dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Angggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon masing-masing di bawah Nomor 1/1968 dan Nomor 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 24 Mei 1968.

Selanjutnya, PT Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Erni Rohainin SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-02731.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010, Serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 83 tanggal 15 Oktober 2010. Tambahan Nomor

31425. Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keutusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham Bank Victoria pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99,99%.

3. Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia (IDX: BRIS; disingkat BSI) adalah bank di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah. Bank ini diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 13.00 WIB atau bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H. Bank ini merupakan hasil penggabungan antara Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRIsyariah. Bank ini pun menjadi bank syariah milik HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara), dengan mayoritas sahamnya dipegang oleh Bank Mandiri, sehingga bank ini dianggap sebagai bagian dari Mandiri Group.

Bank ini memulai sejarahnya pada tanggal 3 Juli 1969 dengan nama PT Bank Djasa Arta dan berkantor pusat di Jalan Suniaradja no. 24B, Bandung, dengan pemilik awalnya terdiri dari Sabas Gunawan, Lilis Surjati, Lies Harjati dan beberapa pemegang saham lain. Belakangan, kantor pusatnya pindah ke Jalan Suniaraja No. 82, dan di tahun 1988, Bank Djasa Arta tercatat memiliki 4 kantor cabang serta

dikelola oleh Darmawan Tanudjaja dkk. Di tanggal 5 Januari 1990, bank ini diakuisisi 51% sahamnya oleh Awong Hidjaja, pemilik perusahaan tekstil Panasia, dengan sisanya dimiliki beberapa pemegang saham lain.

Namanya kemudian berganti menjadi PT Bank Jasa Arta sejak tahun 1994. Sempat juga bank ini di tahun 1997 akan berganti nama lagi sesuai nama induknya menjadi Bank Panasia Internasional, namun batal. Pada tahun 2007, Bank Jasa Arta termasuk bank kecil dengan hanya memiliki 6 kantor cabang, aset Rp 250,1 miliar, dan tercatat sempat merugi. Demi memenuhi Arsitektur Perbankan Indonesia, Bank Jasa Arta pada 2007 sempat menjajaki rencana merger dengan Bank Harfa dan Bank Mitraniaga, dimana bank hasil merger ketiganya akan bermodal Rp 100 miliar dan dimiliki eks-ketiga pemegang saham bank tersebut secara bersamaan.

Sementara itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejak Desember 2001 sudah memiliki unit usaha syariah (UUS)-nya sendiri demi memenuhi keinginan pasar. UUS ini pada tahun 2007 bertumbuh cukup lambat, namun sudah mencatatkan aset Rp 1,14 triliun dan dana pihak ketiga Rp 376 miliar. Belakangan, untuk mengembangkan bisnis perbankan syariahnya, BRI merencanakan spin-off pada UUS-nya itu menjadi bank syariah. Tindakan ini ditempuh setelah manajemen BRI melihat bank syariah lebih memiliki potensi untuk bertumbuh lebih tinggi dibanding UUS.

Untuk memuluskan rencana ini, BRI kemudian mulai membidik dua bank kecil untuk diakuisisi, yaitu PT Bank Jasa Arta dan PT Bank Harmoni Internasional. Akhirnya, di bulan Juni 2007, BRI memutuskan akan membeli Bank Jasa Arta. Akuisisi kemudian resmi dilakukan di tanggal 19 Desember 2007, dengan BRI mengambilalih PT Bank Jasa Arta dari tangan Awong Hidjaja dan dua perusahaan miliknya (PT Panasia Synthetic Abadi dan PT Panasia Intertraco) seharga Rp 61 miliar.

Rencananya, bank syariah milik BRI ini akan memiliki 51 cabang, 45 dari eks-UUS BRI dan 6 dari eks-Bank Jasa Arta serta beraset Rp 1,8 triliun. Setelah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat no. 10/67/Kep.GBI/DPG/2008 tertanggal 16 Oktober 2008, Bank Jasa Arta resmi berganti nama menjadi PT Bank Syariah BRI pada tanggal 17 November 2008 dengan status berubah dari sistem konvensional ke syariah.

Di tanggal 19 Desember 2008, BRI meneken akta pemisahan UUS BRI dan penggabungannya ke dalam bank ini, yang selanjutnya mulai berlaku sejak 1 Januari 2009. Pasca penggabungan itu, nama Bank Syariah BRI diganti lagi menjadi PT Bank BRIsyariah, efektif sejak 15 Desember 2009. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tanggal 9 Mei 2018, bank ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia.

Pada tahun 2020, rencana penggabungan Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah ke dalam perusahaan ini disetujui oleh para

pemegang sahamnya, dan sebelumnya manajemen ketiga bank sudah menyepakati rencana merger di tanggal 12 Oktober 2020. BRIsyariah akan menjadi surviving entity dan dua bank syariah lain melebur ke dalamnya; hal ini dilakukan karena bank tersebut merupakan satu-satunya bank syariah anak usaha BUMN yang sudah go public sehingga prosesnya diharapkan lebih mudah.

Saat itu, belum diputuskan nama baru BRIsyariah pasca-merger, namun dirumorkan akan bernama "Amanah Bank". Belakangan, setelah mendapat izin dari OJK dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tertanggal 27 Januari 2021, PT Bank BRIsyariah Tbk resmi berganti nama menjadi "PT Bank Syariah Indonesia Tbk", dan dua bank syariah lainnya (Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah) resmi melebur ke dalam Bank Syariah Indonesia pada tanggal 1 Mei 2021. Pada hari yang sama, juga diadakan peluncuran nama dan logo baru BSI ke publik. Merger ini diperkirakan akan menghasilkan bank syariah terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar.

Saat ini, BSI tengah mempersiapkan perubahan statusnya dari anak usaha Bank Mandiri menjadi bank BUMN/milik pemerintah (kelima); rencananya, pemerintah akan memegang saham dwiwarna A. Selain itu, tengah disiapkan juga sebuah super app perbankan digital yang direncanakan akan diluncurkan di awal 2023. Ada juga rencana rights issue di kuartal-III 2022 sebesar Rp 5 triliun yang diharapkan mampu

meningkatkan pasar perbankan syariah dan memenuhi kewajiban free float di bursa saham.

4. Bank Jabar Banten Syariah

Pendirian bank bjb syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha syariah.

Manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Saat ini bank bjb syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No 135, dan telah memiliki 10 (sepuluh) kantor cabang, kantor cabang pembantu 53 (lima puluh tiga), 3 Mobil Kas Keliling, jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan 77.000 jaringan ATM Bersama.

5. Bank Mega Syariah

Bank Mega Syariah adalah lembaga Perbankan syariah yang berpusat di Jakarta. Bank ini berawal dari anak usaha Asuransi Tugu yaitu PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu) yang berdiri pada 14 Juli 1990. Pada 2001, bank ini diambil alih CT Corp (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo), pada tanggal 25 Juli 2004 di konversi menjadi Bank Syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia disingkat BSMI, lalu resmi beroperasi sebagai bank syariah pada 25 Agustus 2004.

Pada tanggal 7 November 2007, melakukan perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional yang menjadi sister company-nya, yakni PT Bank Mega, Tbk, tetapi berbeda warna. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, bank ini berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah. Pada tanggal 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi Bank devisa dan kemudian pada tanggal 8 April 2009 memperoleh izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan Ibadah haji (BPS BPIH).

Dalam perjalanannya, Bank Mega Syariah telah melakukan perubahan logo dengan bentuk dan warna yang signifikan dengan logo Bank Mega serta kepindahan kantor pusatnya ke Menara Mega Syariah, Kuningan, Jakarta. Selambat-lambatnya pada bulan Juni

2023, Bank Mega Syariah akan mengakuisisi dan merger dengan BTN Syariah, unit usaha syariah Bank Tabungan Negara.

6. Bank Panin Syariah

Panin Dubai Syariah Bank adalah lembaga perbankan yang berbasis di Jakarta. Bank ini dulunya bernama Bank Harfa yang berpusat di Surabaya, dan sempat juga bernama Panin Bank Syariah dari tahun 2009-2016. Bank Panin Dubai Syariah awalnya didirikan sebagai sebuah bank pasar (kini bank perkreditan rakyat) bernama Bank Pasar Bersaudara Jaya (ejaan lama: Bersaudara Djaja) pada tanggal 8 Januari 1972. Di tanggal 8 Januari 1990, namanya menjadi Bank Bersaudara Jaya seiring naik status sebagai bank umum (efektif sejak 3 Januari 1991) dengan kantor pusat di Kota Malang. Namanya kemudian menjadi Bank Harfa di tanggal 27 Maret 1997, pasca pengalihan kepemilikan ke Grup Sekar yang bergerak di industri makanan dan peternakan. Kantor pusatnya kemudian juga dipindah ke Surabaya.

Demi memenuhi Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Bank Harfa pada 2007 sempat menjajaki rencana merger dengan Bank Jasa Arta dan Bank Mitraniaga dimana bank hasil merger ketiganya akan bermodal Rp 100 miliar dan dimiliki eks-ketiga pemegang saham bank tersebut secara bersamaan. Bank Harfa saat itu dikuasai oleh Ali Kusno Fusin 52%, Tony Iwan Haryono 28%, Kasim Gunawan 20% dan merupakan bank kecil dengan aset Rp 177 miliar dan modal Rp 20

miliar. Belakangan, Bank Harfa lebih memilih dibeli Panin Bank pada akhir tahun 2007 seharga Rp 50 miliar. Selain untuk memenuhi kewajiban API, akuisisi tersebut juga ditujukan untuk membentuk lengan bisnis Panin Bank di bidang perbankan syariah.

Nama PT Bank Harfa kemudian diganti menjadi PT Bank Panin Syariah (ditulis Panin Bank Syariah) di tanggal 3 Agustus 2009, kantor pusatnya dipindah ke Jakarta dan memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009. Terakhir, bank ini resmi beroperasi sebagai bank syariah pada tanggal 2 Desember 2009.

Pada tanggal 15 Januari 2014, Panin Bank Syariah resmi menjadi perusahaan publik dengan melepas 50% sahamnya dengan harga penawaran Rp 100. Di saat yang sama, juga dicatatkan waran, keduanya di Bursa Efek Indonesia. Panin Bank Syariah merupakan bank syariah pertama yang go public. Belakangan, terobosan lain juga dilakukan manajemen bank ini dengan menggandeng Dubai Islamic Bank, bank syariah asal Dubai, Uni Emirat Arab dalam kepemilikan bank ini (sekitar 39,5%, lalu menurun menjadi 38,25%).

Nama perusahaan kemudian menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sejak 11 Mei 2016. Sedangkan untuk identitas barunya (bernama Panin Dubai Syariah Bank), baru diperkenalkan pada 21 Maret 2017.[16] Kini, kepemilikan Panin Dubai Syariah Bank

dikuasai oleh Panin Bank (67,3%), Dubai Islamic Bank (25,1%) dan publik (7,6%).

7. BCA Syariah

PT. Bank BCA Syariah ("BCA Syariah") berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010.

BCA Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Masyarakat yang menginginkan produk dan jasa perbankan yang berkualitas serta ditunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi merupakan target dari BCA Syariah.

Komitmen penuh BCA sebagai perusahaan induk dan pemegang saham mayoritas terwujud dari berbagai layanan yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah BCA Syariah pada jaringan cabang BCA yaitu setoran (pengiriman uang) hingga tarik tunai dan debit di seluruh ATM dan mesin EDC (Electronic Data Capture) milik BCA, semua tanpa dikenakan biaya. Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi

maupun menyampaikan pengaduan dan keluhan, masyarakat dan nasabah khususnya dapat menghubungi Halo BCA di 1500888.

8. Maybank Syariah Indonesia

PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank Indonesia" atau "Bank") adalah salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari grup Malayan Banking Berhad (Maybank), salah satu grup penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN. Sebelumnya, Maybank Indonesia bernama PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) yang didirikan pada 15 Mei 1959, mendapatkan ijin sebagai bank devisa pada 1988 dan mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang telah merger menjadi Bursa Efek Indonesia) pada 1989.

Maybank Indonesia menyediakan serangkaian produk dan jasa komprehensif bagi nasabah individu maupun korporasi melalui layanan Community Financial Services (Perbankan Ritel dan Perbankan Non-Ritel) dan Perbankan Global, serta pembiayaan otomotif melalui entitas anak yaitu WOM Finance untuk kendaraan roda dua dan Maybank Finance untuk kendaraan roda empat. Maybank Indonesia juga terus mengembangkan layanan dan kapasitas Digital Banking melalui M2U ID App, M2U ID Web, dan berbagai saluran lainnya.

Per Desember 2021, Maybank Indonesia memiliki 356 cabang termasuk cabang Syariah yang tersebar di Indonesia serta satu cabang

luar negeri (Mumbai, India), 22 Mobil Kas Keliling dan 1.033 ATM yang terkoneksi dengan lebih dari 20.000 ATM tergabung dalam jaringan ATM PRIMA, ATM BERSAMA, ALTO, CIRRUS, dan terhubung dengan 3.500 ATM Maybank di Singapura, Malaysia dan Brunei. Maybank Indonesia mengelola simpanan nasabah sebesar Rp114,9 triliun dan memiliki total aset senilai Rp168,8 triliun pada akhir Desember 2021.

9. Bank Danamon Indonesia

Bank Danamon didirikan pada tanggal 16 Juli 1956 dengan nama PT Bank Kopra Indonesia. Pada tahun 1976, nama bank ini berubah menjadi PT Bank Danamon Indonesia. Bank ini menjadi bank pertama yang memelopori pertukaran mata uang asing dengan menjadi bank devisa pertama di Indonesia pada tahun 1976 dan tercatat sahamnya di bursa sejak tahun 1989.

Pada tahun 1997, sebagai akibat dari krisis finansial di Asia, Bank Danamon mengalami kesulitan likuiditas dan akhirnya oleh Pemerintah ditempatkan di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai bank yang diambil alih Pemerintah (Bank Take Over atau BTO). Pada tahun 1999, Pemerintah melalui BPPN melakukan rekapitalisasi Bank Danamon sebesar Rp 32 miliar dalam bentuk Surat Hutang Pemerintah (Government Bonds). Pada tahun yang sama, beberapa bank BTO akhirnya digabung menjadi satu dengan Bank Danamon sebagai salah satu bagian dari

rencana restrukturisasi BPPN. Pada tahun 2000, Bank Danamon kembali melebarkan sayapnya dengan menjadi bank utama dalam penggabungan 8 bank BTO lainnya. Pada saat inilah Bank Danamon mulai muncul sebagai salah satu pilar ekonomi di Indonesia.

Pada 3 tahun berikutnya, Bank Danamon mengalami restrukturisasi besar-besaran mulai dari bidang manajemen, sumber daya manusia, organisasi, sistem informasi, anggaran dasar dan logo perusahaan. Usaha keras yang dilakukan ini akhirnya berbuah hasil dalam membentuk fondasi dan infrastruktur bagi Bank Danamon dalam tujuannya untuk meraih pertumbuhan yang maksimal berdasarkan transparansi kerja, tanggung jawab kepada masyarakat, integritas sebagai salah satu pilar ekonomi di Indonesia dan sikap profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia (atau lebih dikenal dengan istilah TRIP).

10. Bank Permata

Bank Permata memulai sejarahnya pada tanggal 17 Desember 1954 dengan nama "PT Bank Persatuan Dagang Indonesia". Pada tanggal 8 Mei 1956, Bank Indonesia menetapkan bank ini sebagai sebuah bank devisa. Pada tanggal 20 Agustus 1971, nama bank ini diubah menjadi "PT Bank Bali". Pada tanggal 15 Januari 1990, bank ini resmi melantai di Bursa Efek Jakarta. Pada tahun 2000, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) merekapitalisasi bank ini, dan pemerintah Indonesia pun menjadi pemegang saham utama bank ini.

Pada tahun 2002, dengan pengawasan dari BPPN, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Prima Express, PT Bank Artamedia, dan PT Bank Patriot digabung ke dalam bank ini. Nama bank ini kemudian diubah menjadi seperti sekarang. Pada tahun 2004, Standard Chartered dan Astra International masing-masing mengambil alih 25,86% saham bank ini, sehingga keduanya bersama-sama menjadi pengendali bank ini, dan pada akhir tahun 2004, keduanya meningkatkan kepemilikan sahamnya di bank ini masing-masing menjadi 31,55%. Pada tahun 2006, keduanya kembali meningkatkan kepemilikan sahamnya di bank ini menjadi 89,01%.

Pada tahun 2010, bank ini mengakuisisi PT GE Finance Indonesia, dan kemudian mengubah nama perusahaan tersebut menjadi PT Sahabat Finansial Keluarga. Pada tahun 2010 juga, untuk pertama kalinya, bank ini berhasil mencatatkan laba bersih sebesar lebih dari Rp 1 triliun. Setahun kemudian, untuk pertama kalinya, bank ini juga berhasil mencatatkan aset sebesar lebih dari Rp 100 triliun. Pada tahun 2014, perusahaan ini resmi menguasai 25% saham PT Astra Sedaya Finance, namun kemudian dilepas pada tahun 2018. Pada tanggal 13 Desember 2019, Bangkok Bank mengumumkan rencananya untuk mengakuisisi mayoritas saham bank ini.

Pada tahun 2020, Bangkok Bank resmi membeli 89,12% saham bank ini, dan kemudian ditingkatkan menjadi 98,71%. Sesuai arahan dari Otoritas Jasa Keuangan, PT Bangkok Bank Indonesia lalu

mengintegrasikan kantor cabangnya di Jakarta, serta kantor cabang pembantunya di Medan dan Surabaya ke dalam bank ini.

Penghargaan Pada tahun 2019, layanan PermataBank memperoleh 5 penghargaan Satisfaction Loyalty & Engagement (SLE) Award 2019 berdasarkan survei Infobank dan Marketing Research Indonesia (MRI), salah satunya adalah peringkat #1 untuk kategori OVERALL-ENGAGEMENT INDEX 2019 (bank umum konvensional / bank buku 3). Layanan Nasabah PermataTel telah meraih penghargaan Contact Center Service Excellence Award 2019 untuk 10 kategori, dari Majalah Service Excellence. Di kategori produk, kartu kredit, kartu debit dan Unit Usaha Syariah PermataBank meraih peringkat I & II untuk Digital Brand Awards 2019 oleh Majalah InfoBank. PermataBank juga meraih sejumlah peringkat service excellence di kategori Bank Umum dan Bank Unit Usaha Syariah, dalam Banking Service Excellence Award 2020 oleh majalah InfoBank bekerjasama dengan Market Research Indonesia.

11. Bank CIMB Niaga

Bank CIMB Niaga didirikan oleh Soedarpo Sastrosatomo, J. Panglaykim, Roestam Moenaf, dan Ali Algadri pada tanggal 26 September 1955 dengan nama PT Bank Niaga. Pada tanggal 11 November 1955, bank ini mendapat izin dari Kementerian Keuangan untuk beroperasi sebagai sebuah bank umum. Pada tahun 1973, Bank Agung digabung ke dalam bank ini. Pada tanggal 22 November 1974,

Bank Indonesia menetapkan bank ini sebagai sebuah bank devisa. Pada tahun 1978, Bank Tabungan Bandung digabung ke dalam bank ini, dan pada tahun 1983, Bank Amerta juga digabung ke dalam bank ini. Pada tahun 1987, bank ini menjadi bank asal Indonesia pertama yang menyediakan ATM. Pada tanggal 29 November 1989, bank ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia.

Pada tahun 1991, bank ini menjadi bank asal Indonesia pertama yang menyediakan layanan perbankan secara daring. Pada tanggal 16 September 2004, bank ini membentuk Unit Usaha Syariah untuk dapat menyediakan layanan perbankan dengan prinsip syariah. Akibat krisis finansial Asia 1997, mayoritas saham bank ini kemudian dipegang oleh pemerintah Indonesia melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Pada tahun 2002, Commerce Asset-Holding Berhad (kini CIMB Group) resmi mengakuisisi mayoritas saham bank ini.Bank ini memulai sejarahnya pada tanggal 11 Maret 1948 sebagai salah satu bank swasta pertama di Indonesia dengan nama "NV Bank Perniagaan".

Pada tahun 1977, NV Central Commercial Bank digabung ke dalam bank ini. Pada bulan Maret 1989, bank ini mengubah namanya menjadi "PT Bank Lippo". Pada tahun yang sama, PT Bank Umum Asia digabung ke dalam bank ini. Pada tahun 1989, bank ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini kemudian melakukan ekspansi besar-besaran, sehingga pada Desember 2003, bank ini telah

eksis di 120 kota di seluruh Indonesia. Bank ini pun fokus memberikan pinjaman pada sektor komersial retail, perusahaan distribusi dan perdagangan kecil dan menengah. Hingga tanggal 29 Februari 2004, pemegang mayoritas saham LippoBank adalah Swissasia Global. Pada tanggal 30 September 2005, pemegang mayoritas saham CIMB Group, yakni Khazanah Nasional resmi mengakuisisi mayoritas saham bank ini.

Bank CIMB Niaga Cabang Kebumen Kantor Bank CIMB Niaga cabang Kebumen Sebagai pemilik mayoritas saham Bank Niaga (melalui CIMB Group) dan LippoBank, sejak tahun 2007, Khazanah telah berencana untuk menggabungkan kedua bank tersebut, sesuai kebijakan dari Bank Indonesia. Pada bulan Mei 2008, nama Bank Niaga diubah menjadi CIMB Niaga. Pada tanggal 1 November 2008, LippoBank resmi digabung ke dalam CIMB Niaga. Pada tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan meningkatkan status bank ini menjadi Bank BUKU 4.

12. Bank Sinarmas

Bank Sinarmas memulai sejarahnya pada tahun 1989 dengan nama "PT Bank Shinta Indonesia", dan dimiliki oleh Grup Shinta milik keluarga Hermijanto yang bergerak di industri tekstil dan manufaktur. Pada tahun 1993, bank ini membuka kantor cabang di Bandung, dan setahun kemudian, Kementerian Keuangan menetapkan bank ini sebagai sebuah bank persepsi. Pada tahun 1995, bank ini juga

ditetapkan sebagai sebuah bank devisa. Pada tahun 1996, bank ini membuka kantor cabang di Surabaya. Pada April 2005, PT Sinar Mas Multiartha Tbk dan PT Shinta Utama resmi menjadi pemegang mayoritas saham bank ini yang saat itu beraset Rp 436 miliar.

Pada akhir 2006, bank ini pun mengubah namanya menjadi seperti sekarang dan asetnya sudah menjadi Rp 2 triliun. Pada tahun 2009, bank ini mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS). Bank ini juga ditetapkan oleh Bappebti sebagai bank penyimpan margin dana kompensasi dan dana jaminan, serta mendapat izin dari Bapepam untuk menjalankan kegiatan wali amanat. Pada tahun 2010, bank ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2018, bank ini ditetapkan sebagai bank penerima setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH).

Layanan Bank Sinarmas memiliki sejumlah layanan perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen dan nasabah. Beberapa layanan utamanya adalah layanan pendanaan, berupa tabungan yang ditujukan untuk konsumen umum, pelajar, dan anak-anak, deposito, tabungan valas, giro, dan tabungan haji. Layanan reksadana, berupa transaksi saham, valas, dan investasi; layanan bancasurance, yaitu layanan asuransi. Dan sejumlah layanan lainnya, seperti layanan kartu kredit dan internet banking.

13. BPD DKI Jakarta

Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibu kota Jakarta atau Bank DKI adalah sebuah bank di Indonesia. Bank ini didirikan pada 11 April 1961 dan berkantor pusat di Jakarta Pusat. Bank DKI didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Pada saat pendirian, pemegang saham adalah Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebanyak 99,97% dan 0,03% saham dimiliki oleh PD. Pasar Jaya, dengan jumlah modal disetor sebesar Rp 3.900.000.000,00 (tiga triliun sembilan ratus miliar rupiah).

Pada tanggal 30 November 1992, Bank DKI resmi menjadi Bank Devisa. Pada tahun 1999, Bank DKI berubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Sesuai amanat dalam Anggaran Dasar sebagaimana telah diperbaharui dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank DKI No 30 tanggal 15 April 2016 dibuat oleh dan dihadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta, Bank DKI bergerak di bidang usaha perbankan sesuai dalam Peraturan dan Perundang-undangan.

Kegiatan Usaha Untuk itu Bank DKI melakukan berbagai kegiatan usaha, diantaranya Consumer Banking Dana (Funding), menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito

berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan hal tersebut. Produk tabungan dari Bank DKI antara lain Tabungan Monas (Monas Umum, Monas Bisnis), Tabungan Simpeda, TabunganKu.

14. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, atau disingkat Bank BPD DIY, adalah sebuah bank BUMD di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bank BPD DIY didirikan pada tanggal 15 Desember 1961, berdasarkan akta notaris Nomor 11, Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat. Sebagai suatu perusahaan daerah, pertama kalinya Bank BPD DIY diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1976. Dengan berjalannya waktu, dilakukan berbagai penyesuaian.

Landasan hukum pendirian Bank BPD DIY adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993, junctis Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1997 dan Nomor 7 Tahun 2000. Tujuan pendirian bank adalah untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sejak Januari 2007 Bank BPD DIY telah membuka unit perbankan Syariah.

Hingga saat ini Bank BPD DIY setidaknya telah memiliki 175 tempat pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari 1 kantor pusat, 7 kantor cabang, 15 kantor

cabang pembantu, 73 kantor kas, 22 kantor payment point, 6 armada kas mobil dan 55 lokasi mesin ATM serta 4 kantor layanan syariah.

Kegiatan usaha syariahnya meliputi Giro Wadiah, Tabungan Sutera Mudharabah, Tabungan Shafa Wadiah, Tabungan Shafa Mudharabah, Deposito Mudharabah, Pembiayaan Pemilikan Rumah Murabahah dan Renovasi Rumah Istishna, Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Murabahah dan Pembiayaan Mudharabah

15. BPD Jawa Tengah

Bank Jateng (dahulu bernama Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah/BPD Jateng) adalah satu-satunya bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Jawa Tengah. Bank Jateng berpusat di kota Semarang. Bank Jateng didirikan pada tahun 1963 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PT BPD Jateng). Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakaat dan tokoh pengusaha swasta di Jawa Tengah atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pertama kali didirikan di Semarang berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum & Otonomi Daerah No. DU 57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral No. 4/Kep/MUBS/63 tanggal 14 Maret 1963 sebagai landasan operasional Jawa Tengah. Operasional

pertama dimulai pada tanggal 6 April 1963 dengan menempati Gedung Bapindo, Jl. Pahlawan No. 3 Semarang sebagai Kantor Pusat.

Tujuan pendirian bank adalah untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang Kas Daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Jawa Tengah. Bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah ini sempat mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan usaha. Pada tahun 1969 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1969, menetapkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kemudian melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 1993, status badan usaha Bank berubah menjadi Perusahaan Daerah (Perusda). Sampai akhirnya pada tahun 1999, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 1998 dan akte pendirian No. 1 tanggal 1 Mei 1999 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.8223.HT.01.01 tahun 1999 tanggal 15 Mei 1999, Bank kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas. Pada tanggal 7 Mei 1999, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mengikuti Program Rekapitalisasi Perbankan. Pada tanggal 7 Mei 2005, PT. Bank

Pembangunan Daerah Jawa Tengah menyelesaikan program rekapitalisasi, disertai pembelian kembali kepemilikan saham yang dimiliki Pemerintah Pusat oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Seiring perkembangan perusahaan dan untuk lebih menampilkan citra positif perusahaan terutama setelah lepas dari program rekapitalisasi, maka manajemen mengubah logo dan call name perusahaan yang merepresentasikan wajah baru Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.68 tanggal 7 Mei 2005 Notaris Prof. DR. Liliana Tedjosaputro dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C.17331 HT.01.04.TH.2005 tanggal 22 Juni 2005, maka nama sebutan (call name) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berubah dari sebelumnya Bank BPD Jateng menjadi Bank Jateng Visi & Misi

16. BDP Aceh

Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk

Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi.

Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut. Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

17. BPD Sumatera Utara

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 04 November 1961 dengan Akte Notaris Rusli No. 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan UU No.13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai Perda Tk.I Sumatera Utara No. 5/1965, dengan modal dan saham yang dimiliki Pemda Tk.I dan Pemda Tk. II Sumatera Utara.[62]

Kebijakan dan gagasan untuk mendirikan Unit Usaha Syariah didasari tingginya minat masyarakat di Sumatera Utara untuk mendapatkan layanan berbasis syariah dan telah berkembang cukup lama dikalangan Bank SUMUT, terutama sejak dikeluarkannya UU No.Tahun 1998 yang memberi peluang bagi Bank Konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah. Selain Bank Umum yang membuka Divisi Usaha Syariah Bank Konvensional seperti Bank SUMUT juga berperan didalamnya untuk membuka Unit/Divisi Usaha Syariah.[63]

Dengan semakin maraknya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dan mempertimbangkan prospek layanan berbasis syariah yang belum diselenggarakan di Sumatera Utara, maka sesuai Surat Bank Indonesia Medan pada tanggal 18 Oktober 2004 Bank SUMUT melebarkan sayapnya dengan membuka Unit Usaha Syariah. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SUMUT No.

[62] Bank SUMUT News, edisi XII-2011, hlm. 7
[63] https://www.banksumut.co.id

364/DIR/DPP-PP/SK/2004 dan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SUMUT No. 365/DIR/DPP-PP/2004 tanggal 28 Oktober 2004 Bank SUMUT Cabang Medan dan Cabang Syariah Padangsidimpuan resmi dioperasikan. Untuk semakin memperluas jangkauan pelayanan berbasis syariah maka pada tanggal 16 Desember 2005 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SUMUT No. 498/DIR/DPP-PP/SK/2005 dioperasikan Bank SUMUT Cabang Syariah Tebing Tinggi Pada tahun 2015 kantor Bank SUMUT Cabang Syariah berjumlah 5 kantor cabang syariah dengan beberapa kantor cabang pembantu yaitu sebagai berikut:

a. Kantor Cabang Syariah Medan dengan 11 kantor Cabang Pembantu.
b. Kantor Cabang Syariah Padangsidimpuan dengan 1 kantor Cabang Pembantu Panyabungan.
c. Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi dengan 3 kantor Cabang Pembantu.
d. Kantor Cabang Syariah Sibolga
e. Kantor Cabang Syariah Pematang Siantar dengan 2 kantor Cabang pembantu

18. BPD Sumatera Barat

Bank Nagari (merupakan sebutan untuk PT Bank Nagari) adalah satu-satunya bank milik pemerintah daerah Sumatra Barat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di

Sumatera Barat. Bank Nagari berpusat di kota Padang. Bank Nagari didirikan pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (PT BPD Sumbar).

Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatra Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Sampai saat ini Bank Nagari telah tersebar di beberapa kota atau kabupaten di Sumatra Barat bahkan di beberapa kota diluar Sumatra Barat, yaitu Jakarta, Bandung dan Pekanbaru.

Bank Nagari juga mengoperasikan sistem perbankan syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah, bernama Bank Nagari Syariah. UUS Bank Nagari dibentuk untuk memperluas jangkauan target pasar Bank Nagari, meningkatkan sumber pendapatan dalam rangka memperkuat produktivitas dan kesehatan dimasa depan serta pengelolaan dana haji yang akan dilakukan melalui bank syariah. Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari mulai dioperasikan pada akhir tahun 2006, yaitu pada tanggal 28 September 2006, sesuai surat persetujuan Bank Indonesia Padang No 8/1/DPbs/PIA, tanggal 28 September 2006.

Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Nagari dengan Akta Notaris Hendri Final No. 1 tanggal 1 Februari 2007 dan pengesahan Menteri Kehakiman No. W3-00074 HT.01.01-TH 2007 tanggal 4 April 2007. Modal awal UUS yaitu sebesar Rp 1.600.000.000,- (Satu

Miliar Enam Ratus Juta Rupiah). Sampai saat ini Unit Usaha Syariah Bank Nagari telah mempunyai 3 Kantor Cabang Syariah, 6 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 35 unit Layanan Syariah, dan 1 Kantor Kas Syariah. 3 Kantor Cabang Syariah berada di, Padang, Payakumbuh dan Solok, sedangkan 6 Kantor Cabang Pembantu Syariah berada di, Bukittinggi, Pariaman, Padang Panjang, Simpang Ampek, Sikabau Koto Baru dan Batu Sangkar.

Untuk melayani keinginan masyarakat bertransaksi secara syariah di seluruh sumatera barat, Kantor Cabang Bank Nagari Konvensional membuka layanan syariah (office channeling) pada cabang masing-masing. Sejak dibuka pada tanggal 28 September 2006, hingga tanggal 31 Oktober 2016, posisi aset Bank Nagari Unit Usaha Syariah yaitu Rp. 1.322 Miliar dan perolehan laba bersih yaitu Rp. 60,7 Miliar. Bank Nagari Unit Usaha Syariah juga telah menerima award dari Majalah Infobank dengan predikat sangat bagus berdasarkan rating Infobank tahun 2013 untuk periode tahun 2012, kategori Unit Usaha Syariah Bank Umum dengan aset di atas 1 Triliun, yang diselenggarakan oleh Majalah Infobank di Hotel Shangri-La Jakarta pada tanggal 6 November 2013.

19. BPD Kalimantan Selatan

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan didirikan pada tanggal 25 Maret 1964, berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 1964 berdasarkan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, dengan modal dasar sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Operasional bank berdasarkan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 26/UBS/65 tanggal 31 Maret 1965. Untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai perkembangan terkini, sejak tanggal 5 februari 2020 melalui Akta Notaris Nomor 3 dihadapan Neddy Fermanto, SH. notaris pengganti Nenny Indriani, SH, M. Kn, notaris berkedudukan di kabupaten Banjar yang disahkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011121. AH. 01.02. Tahun 2020 tanggal 8 Februari 2020, maka PD.

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan berubah badan hukum menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan sebutan Bank Kalsel dan modal dasar sebesar Rp5.000.000.000.000, - (lima triliun rupiah). Perubahan Corporate Identity Industri perbankan adalah industri yang bergerak dengan sangat dinamis. Segala sesuatunya berjalan begitu cepat. Volume bisnis dan kompleksitas usaha makin meningkat. Persaingan tambah kompetitif. Nasabah semakin kritis sekaligus cerdas dan aware.

Produk dan jasa layanan baru terus bermunculan. Maka, menjadi suatu keharusan untuk selalu up-to-date terhadap perkembangan dunia luar. Hal itulah yang mendasari terjadinya perubahan di Bank BPD Kalsel. Perubahan yang dikemas dalam grand design yang disebut

rebranding. Rebranding pada dasarnya merupakan upaya yang sistematis untuk membangun dan menampilkan citra baru di mata stakeholders, melalui perubahan corporate identity, cara berkomunikasi, hingga perilaku dan budaya kerja. Output-nya adalah new identity, new image, dan new behaviour.

Corporate identity adalah gambaran utuh mengenai sosok kepribadian, lingkup dan sifat kegiatan, serta aspirasi stakeholders dalam rangka pencitraan Bank Kalsel. Melalui corporate identity baru, secara internal diharapkan dapat menumbuhkan semangat perubahan kinerja ke arah yang lebih baik, menimbulkan rasa percaya diri dan kebanggaan, serta meningkatkan loyalitas seluruh karyawan terhadap Bank Kalsel. Secara eksternal, perubahan tersebut didedikasikan sebagai penanda atas komitmen Bank Kalsel untuk melayani masyarakat dengan lebih profesional.

Perubahan logo sebagai bagian dari corporate identity merupakan starting point dari program rebranding. Perubahan logo menjadi sangat penting dan strategis mengingat logo yang ada telah berusia puluhan tahun dan tinggal 3 Bank Pembangunan Daerah (BPD) se Indonesia yang masih memakai logo serupa. Selain itu, logo dimaksud adalah hasil penyeragaman dari seluruh BPD di Indonesia, sehingga kurang mencerminkan karakteristik dan identitas daerah Kalimantan Selatan. Logo baru diharapkan mampu menyampaikan citra baru Bank BPD Kalsel. Citra yang berisi cita-cita dan harapan baru menuju regional

champion yang eksis dan mampu bersaing dalam industri perbankan nasional. Citra sebagai bank terkemuka, modern, ramah dengan jangkauan regional hingga nasional, tanpa meninggalkan aspek-aspek local content yang positif serta memiliki nilai dan ciri khas tersendiri.

20. BPD Nusa Tenggara Barat

PT Bank NTB Syariah atau Bank NTB Syariah adalah sebuah bank syariah di Indonesia. Bank ini didirikan pada 5 Juli 1964 dan berkantor pusat di Kota Mataram. Sebelumnya bank ini merupakan bank konvensional dengan nama Bank NTB Sejarah Atas kuasa Undang-undang No.13 tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dengan Peraturan Daerah No.6 Tahun 1963 telah menetapkan berdirinya Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (BPD NTB) dengan modal dasar ditetapkan sebesar Rp.60 juta, dengan landasan operasionalnya adalah izin usaha Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia Nomor 45/63/MUBS/6 tanggal 20 November 1963.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah No.6 Tahun 1963, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat telah meresmikan mulai beroperasinya BPD NTB pada tanggal 05 Juli 1964, selanjutnya diperingati sebagai Hari Ulang Tahun BPD. NTB. Dengan bertitik tolak kepada maksud dan tujuan pendirian BPD.NTB telah diarahkan untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-

usaha pembangunan daerah dalam rangka Pembangunan Nasional. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang No.14 Tahun 1967 tanggal 30 Desember 1967 tentang pokok-pokok perbankan telah diadakan penyempurnaan peraturan pendiriannya melalui Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1974, tentang perubahan yang pertama kali peraturan daerah tentang pendirian BPD NTB dengan modal dasar ditingkatkan menjadi Rp.100 juta.

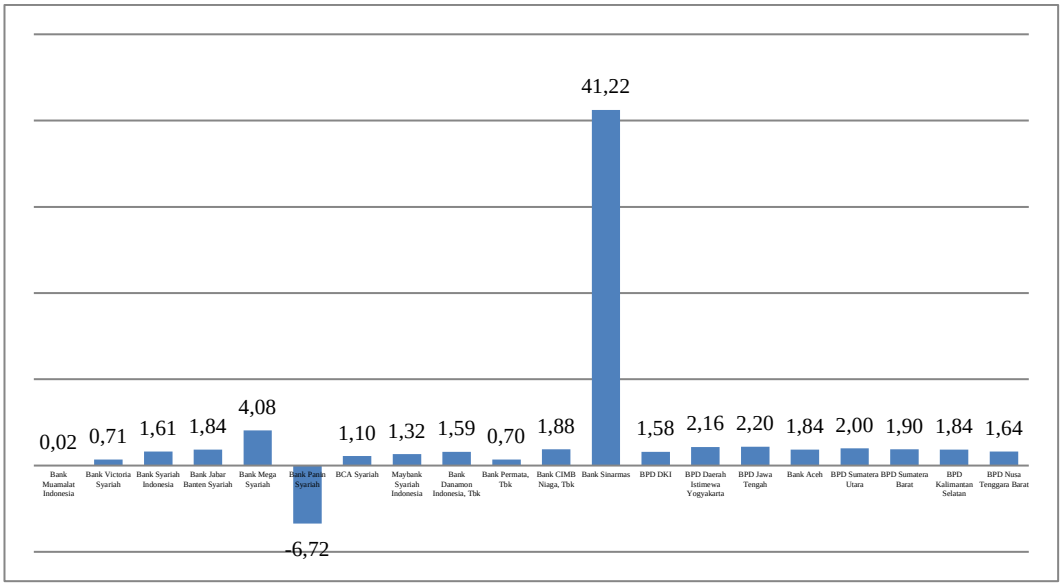
Dengan diberlakukannya Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengatur antara lain mengenai pemilikan dan bentuk hukum pendirian bank, maka BPD NTB telah mengadakan perubahan bentuk hukum pendiriannya. Dalam Peraturan Daerah No.7 Tahun 1999 tanggal 15 Februari 1999, Modal dasar BPD NTB ditetapkan sebesar Rp.100 miliar.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Perkembangan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia

Kinerja keuangan perusahaan merupakan alat ukur untuk menilai kesehatan perusahaan. Jika kinerja keuangannya baik dan memenuhi standar rata-rata industri berarti perusahaan tersebut berhasil dalam melaksanakan strategi usahanya. Kinerja keuangan pada penelitian ini diproksikan oleh *Return On Assets* (ROA). Berikut gambaran kinerja keuangan pada 20 bank syariah di Indonesia tahun 2021.

Gambar IV.1
Perkembangan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia



Sumber: Perbankan Syariah (2021)

Kinerja keuangan pada 20 bank syariah di Indonesia tampak beragam, namun masih terdapat bank syariah yang tingkat profitabilitasnya bernilai minus, yakni Bank Panin Syariah sebesar 6,72%. Adapun nilai ROA tertinggi pada tahun 2021, yaitu Bank Sinarmas dengan dengan persentase ROA sebesar 41,22%.

2. Perkembangan Komposisi Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga dan lain-lain dalam bentuk mata uang rupiah dan valuta asing. Komposisi DPK pada penelitian ini diproksikan oleh tabungan. Berikut gambaran komposisi dana pihak ketiga pada 20 bank syariah di Indonesia tahun 2021.

Tabel IV.1
Perkembangan Komposisi DPK Perbankan Syariah di Indonesia

(dalam Miliar Rupiah)

No	BUS/UUS	DPK	No	BUS/UUS	DPK
1	Bank Muamalat Indonesia	16033,00	**11**	Bank CIMB Niaga, Tbk	15311,38
2	Bank Victoria Syariah	20251,00	**12**	Bank Sinarmas	10374,82
3	Bank Syariah Indonesia	99375,00	**13**	BPD DKI	11884,47
4	Bank Jabar Banten Syariah	22635,64	**14**	BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	788,13
5	Bank Mega Syariah	14451,42	**15**	BPD Jawa Tengah	23817,89
6	Bank Panin Syariah	84205,30	**16**	Bank Aceh	22635,64
7	BCA Syariah	1373,00	**17**	BPD Sumatera Utara	10997,05
8	Maybank Syariah Indonesia	2320,00	**18**	BPD Sumatera Barat	70359,81
9	Bank Danamon Indonesia, Tbk	45518,00	**19**	BPD Kalimantan Selatan	36782,73
10	Bank Permata, Tbk	39781,80	**20**	BPD Nusa Tenggara Barat	76706,72

Sumber: Perbankan Syariah (2022)

Komposisi DPK pada 20 bank syariah di Indonesia tampak beragam jumlahnya. Adapun jumlah tabungan terendah terdapat pada , BPD Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 788,13 Miliar Rupiah. Adapun jumlah tabungan terendah tertinggi pada tahun 2021, yaitu Bank Syariah Indonesia dengan jumlah 99375,00 Miliar Rupiah.

3. Perkembangan Kinerja Sosial Perbankan Syariah di Indonesia

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada pasal 4 dinyatakan, bahwa selain berkewajiban menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedakah,

hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya pada organisasi pengelola zakat. Selain itu Bank Syariah dan UUS juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). Kinerja sosial pada penelitian ini diproksikan oleh zakat. Berikut gambaran kinerja sosial pada 20 bank syariah di Indonesia tahun 2021.

Tabel IV.2
Perkembangan Zakat Perbankan Syariah di Indonesia

(dalam Juta Rupiah)

No	BUS/UUS	Zakat	No	BUS/UUS	Zakat
1	Bank Muamalat Indonesia	8196,86	**11**	Bank CIMB Niaga, Tbk	526,00
2	Bank Victoria Syariah	26,00	**12**	Bank Sinarmas	146,00
3	Bank Syariah Indonesia	127611,00	**13**	BPD DKI	33,00
4	Bank Jabar Banten Syariah	98,93	**14**	BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	5768,00
5	Bank Mega Syariah	4,25	**15**	BPD Jawa Tengah	25,13
6	Bank Panin Syariah	6,51	**16**	Bank Aceh	1255,00
7	BCA Syariah	70,07	**17**	BPD Sumatera Utara	30,00
8	Maybank Syariah Indonesia	2,12	**18**	BPD Sumatera Barat	11,00
9	Bank Danamon Indonesia, Tbk	1,83	**19**	BPD Kalimantan Selatan	6082,00
10	Bank Permata, Tbk	6,94	**20**	BPD Nusa Tenggara Barat	77,10

Sumber: Perbankan Syariah (2022)

Kinerja sosial pada 20 bank syariah di Indonesia tampak beragam jumlahnya. Adapun jumlah zakat terendah terdapat pada Bank Danamon Indonesia, Tbk sebesar 1,83 Juta Rupiah. Adapun jumlah

tabungan terendah tertinggi pada tahun 2021, yaitu Bank Syariah Indonesia dengan jumlah 127.611 Miliar Rupiah.

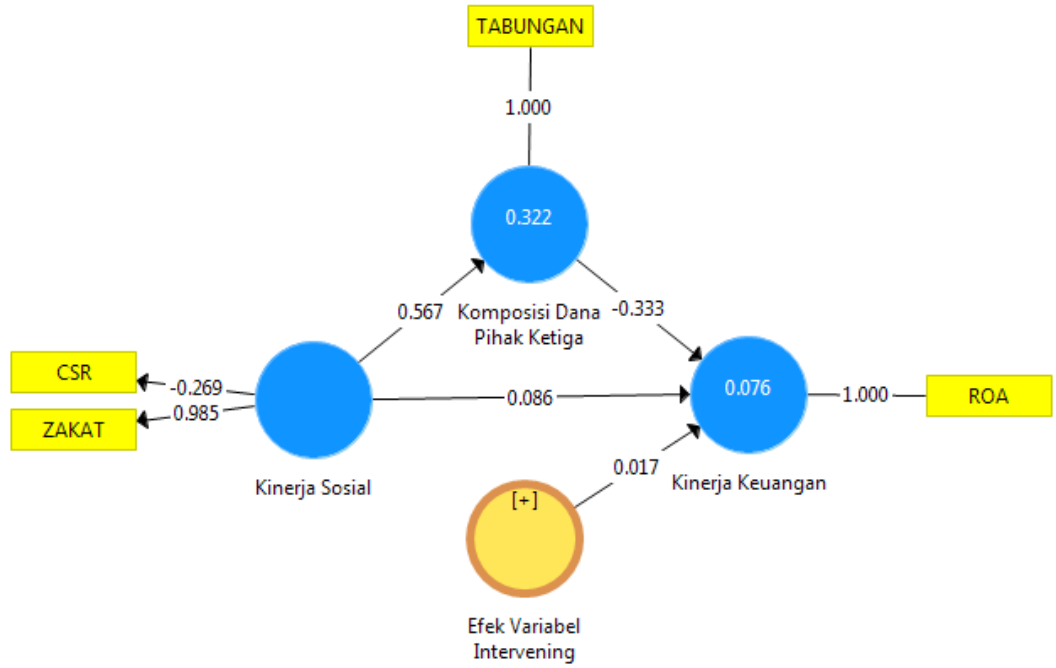
C. Hasil Analisis Data Penelitian

1. Evaluasi Nilai *Outer Model*

a. *Convergent Validity*

Model yang dihasilkan dari estimasi *convergent validity* diukur melalui korelasi antara *component score* dengan hasil uji *software* PLS. Studi ini menggunakan nilai *loading factor* sebesar 0,40 dan diperoleh hasil seperti pada gambar IV.2 berikut.

Gambar IV.2
Convergent Validity I

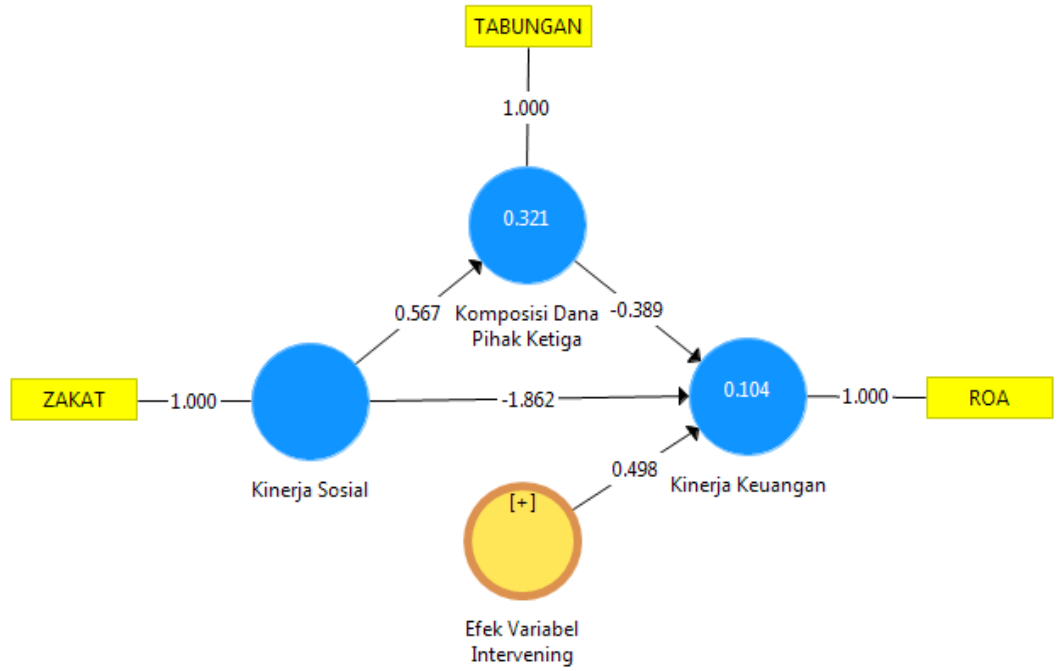


Sumber: Hasil Pengolahan Data PLS 3.0

Hasil uji menunjukkan terdapat 4 indikator dari 3 variabel, yaitu variabel kinerja sosial terdapat 2 indikator (CSR dan Zakat), variabel komposisi dana pihak ketuga terdapat 1 indikator

(Tabungan) dan variabel kinerja keuangan terdiri dari 1 indikator (ROA). Ada 1 indikator yang memiliki *loading factor* dibawah 0,40; yaitu CSR dari variabel kinerja sosial. Artinya, indikator CSR disimpulkan tidak valid dan tidak masuk dalam analisis selanjutnya. Adapun sisanya 3 indikator lainnya (Zakat, Tabungan dan ROA) dinyatakan valid karena nilai *loading factor* diatas 0,40. Oleh karenanya, indikator tersebut dihilangkan untuk memperoleh model dan hasil penelitian yang bagus. Berikut hasil convergent validity setelah indikator CSR dihapuskan.

Gambar IV.3
Convergent Validity II



Sumber: Hasil Pengolahan Data PLS 3.0

Setelah dilakukan pengujian ulang semua indikator dalam kondisi valid. Oleh karenya, penelitian lanjut ke uji *construct validity*.

b. *Construct Validity*

Uji *construct validity* diperoleh dari hasil uji antara korelasi variabel laten dengan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) seperti berikut.

Tabel IV.3
Korelasi Antara Variabel *Laten* dan *AVE*

	Efek Variabel Intervening	Kinerja Keuangan	Kinerja Sosial	Komposisi Dana Pihak Ketiga
Efek Variabel Intervening	1.000			
Kinerja Keuangan	-0.041	1.000		
Kinerja Sosial	0.996	-0.049	1.000	
Komposisi Dana Pihak Ketiga	0.588	-0.245	0.567	1.000

Sumber: Hasil Pengolahan Data PLS 3.0

Uji *construct validity* menunjukkan bahwa korelasi maksimal konstrak seluruh variabel sebagai berikut:

1) Korelasi maksimal konstrak efek variabel intervening keuangan dengan konstrak variabel lainnya adalah 0,996 dan nilai AVE sebesar 1,000. Artinya, nilai variabel laten dibawah nilai AVE $(AVE > Konstrak)$, artinya korelasi variabel intervening diasumsikan memiliki *discriminant validity*.
2) Korelasi maksimal konstrak variabel kinerja keuangan dengan konstrak variabel lainnya adalah -0,049 dan nilai AVE sebesar 1,000. Artinya, nilai variabel laten dibawah nilai AVE $(AVE > Konstrak)$, artinya korelasi variabel kinerja keuangan diasumsikan memiliki *discriminant validity*.
3) Korelasi maksimal konstrak variabel kinerja sosial dengan konstrak variabel lainnya adalah 0,567 dan nilai AVE sebesar

1,000. Artinya, nilai variabel laten dibawah nilai AVE ($AVE > Konstrak$), artinya korelasi variabel kinerja sosial diasumsikan memiliki *discriminant validity*.

4) Korelasi maksimal konstrak variabel komposisi DPK dengan variabel konstrak lainnya adalah 1,000 dan nilai AVE sebesar 1,000. Artinya, nilai variabel laten dibawah nilai AVE ($AVE > Konstrak$), artinya korelasi variabel komposisi DPK diasumsikan memiliki *discriminant validity*.

c. *Construct Reliability*

Uji *construct reliability* digunakan untuk menguji reliabilitas menggunakan uji Cronbach's Alpha, rho_A, Composite Reliability dan AVE. Hasil uji *composite reliability* ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel IV.4
Korelasi Antara *Composite Realiability* dan *AVE*

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Efek Variabel Intervening	1.000	1.000	1.000	1.000
Kinerja Keuangan	1.000	1.000	1.000	1.000
Kinerja Sosial	1.000	1.000	1.000	1.000
Komposisi Dana Pihak Ketiga	1.000	1.000	1.000	1.000

Sumber: Hasil Pengolahan Data PLS 3.0

Hasil uji *construct reliability* menunjukkan nilai masing-masing variabel berada diatas nilai Cronbach's Alpha, rho_A dan *Composite Reliability*, yaitu 0,70; serta nilainya berada di atas nilai AVE, yaitu 0,50. Sehingga dapat disimpulkan variabel kinerja

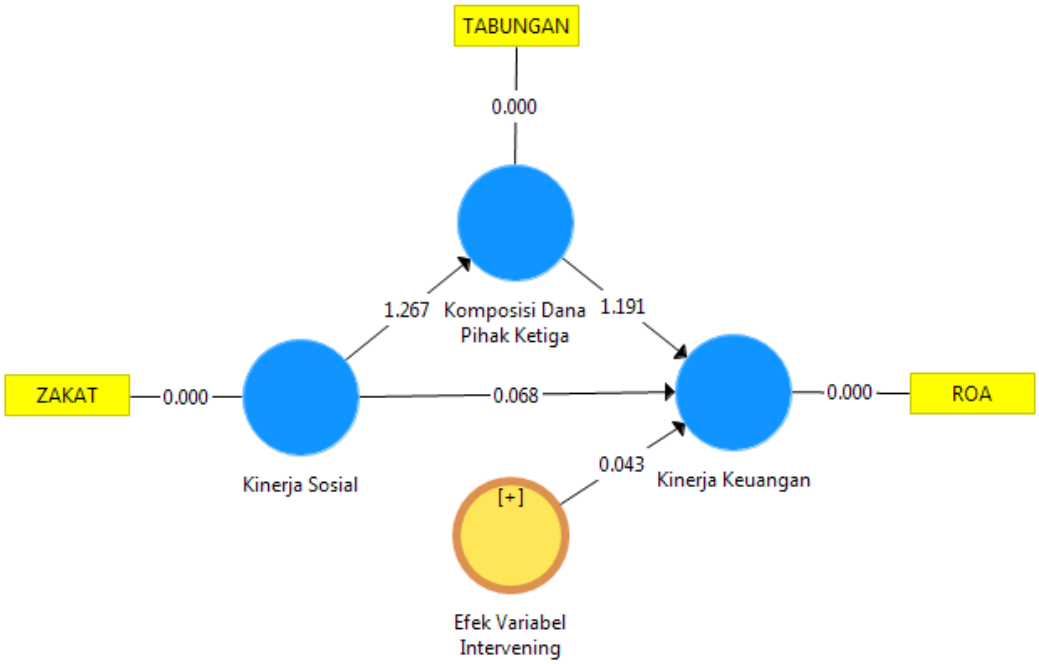
sosial, komposisi dana pihak ketiga, kinerja keuangan dan variabel moderasi sudah konsisten (reliabel).

2. Evaluasi Nilai *Inner Model*

a. *Direct Effect Test*

Direct Effect Test digunakan untuk mengukur signifikasi korelasi antara variable laten dengan *Direct Effect Test* sesuai parameter jalur strukturalnya. Apabila masing-masing variabel memiliki nilai t_{hitung} > 1,96 serta probabilitas > 5%, maka variabel tersebut signifikan dan apabila masing-masing variabel memiliki nilai t_{hitung} < 1,96 serta probabilitas > 5%, maka variabel tersebut tidak signifikan. Berikut hasil *Direct Effect Test* dapat ditampilkan pada gambar 4.

Gambar IV.4
Direct Effect Test



Sumber: Hasil Pengolahan Data PLS 3.0

Berdasarkan gambar IV.4 hasil *Direct Effect Test* untuk masing-masing variabel. Berikut ditampilkan secara rinci hasil *Direct Effect Test* dari masing-masing variabel.

Tabel IV.5
Direct Effect Test

	Origi...	Sam...	Stan...	T Stat...	P Values
Efek Variabel Intervening -> Kinerja Keuangan	0.498	-0.453	11.497	0.043	0.965
Kinerja Sosial -> Kinerja Keuangan	-1.862	0.921	27.547	0.068	0.946
Kinerja Sosial -> Komposisi Dana Pihak Ketiga	0.567	0.342	0.447	1.267	0.206
Komposisi Dana Pihak Ketiga -> Kinerja Keuangan	-0.389	-0.431	0.326	1.191	0.234

Sumber: Hasil Pengolahan Data PLS 3.0

Hasil *Direct Effect Test* menunjukkan semua variabel memiliki nilai t_{hitung} < 1,96 serta probabilitas < 5%, maka dapat disimpulkan bahwa:

1) Tidak terdapat pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.
2) Tidak terdapat pengaruh kinerja sosial terhadap komposisi dana pihak ketiga perbankan syariah di Indonesia.
3) Tidak terdapat pengaruh komposisi dana pihak ketiga terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.
4) Komposisi dana pihak ketiga tidak memediasi pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.

b. *Indirect Effect Test*

Berdasarkan gambar IV.4 hasil *Indirect Effect Test* untuk masing-masing variabel. Berikut ditampilkan secara rinci hasil *Indirect Effect Test* dari masing-masing variabel.

Tabel IV.6
Indirect Effect Test

Efek Variabel Intervening -> Kinerja Keuangan	0.000	-0.000	0.000		
Kinerja Sosial -> Kinerja Keuangan	-0.220	-0.160	0.284	0.777	0.437
Kinerja Sosial -> Komposisi Dana Pihak Ketiga		0.000	0.000		
Komposisi Dana Pihak Ketiga -> Kinerja Keuangan		-0.000	0.000		

Sumber: Hasil Pengolahan Data PLS 3.0

Hasil *Indirect Effect Test* menunjukkan nilai t_{hitung} < 1,96 serta probabilitas < 5%, maka dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung tidak terdapat pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.

3. Evaluasi Nilai R Square (R^2)

Evaluasi nilai R Square (R^2) bagi variabel laten endogen merupakan bentuk evaluasi untuk mengetahui seberapa besar varian dalam model mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel endogen. Besarnya nilai R^2 tergantung dari seberapa komplek model yang dibangun dalam suatu penelitian. Semakin komplek model yang dibangun artinya semakin banyak variabel yang dilibatkan, maka nilai R^2 akan semakin besar. Begitu juga jika model yang dibangun didalam penelitian sederhana, maka nilai R^2 juga akan kecil. Nilai R^2 maksimum bernilai 1, artinya tidak ada lagi variabel eksogen yang bisa

mempengaruhi variabel endogen. Berikut ditampilkan hasil uji *R Square*.

Tabel IV.6
Evaluasi Nilai R Square (R^2)

	R Square	R Square Adjusted
Kinerja Keuangan	0.104	-0.064
Komposisi Dana Pihak Ketiga	0.321	0.284

Sumber: Hasil Pengolahan Data PLS 3.0

Berdasarkan hasil pengujian nilai *R Square* diperoleh dua model persamaan, yaitu:

1. Nilai *R Square* kinerja keuangan sebesar 0,104 atau 10,4% yang menjelaskan bahwa variabel kinerja sosial, komposisi DPK dan efek variabel intervening memberikan kontribusi sebesar 10,4% terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan sisanya 89,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Nilai *R Square* komposisi DPK sebesar 0,321 atau 32,1% yang menjelaskan bahwa variabel kinerja sosial memberikan kontribusi sebesar 32,1% terhadap komposisi DPK perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan sisanya 67,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

D. Pembahasan Penelitian

Judul dari penelitian ini adalah Pengaruh Kinerja Sosial Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Komposisi Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Intervening. Berdasarkan hasil uji *direct effect test* di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. **Pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah.**

   Hasil *direct effect test* menunjukkan nilai t_{hitung} < 1,96 serta probabilitas < 5%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. Begitupun dengan hasil *Indirect Effect Test* menunjukkan nilai t_{hitung} < 1,96 serta probabilitas < 5%, maka dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung tidak terdapat pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.

   Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sidik & Reskino menunjukkan kinerja sosial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROE.[64] Hal ini dikarenakan secara nasional perbankan syariah di Indonesia yang melakukan aktivitas sosial tidak mengalami pertumbuhan profit yang signifikan. Selain itu, perbankan syariah baru

[64]Ichwan Sidik dan Reskino, "Pengaruh Zakat dan ICSR terhadap Reputasi dan Kinerja," *SimposiumNasionalAkuntansiXIX*,2016,http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA%20XIX%20(19)%20Lampung%202016/makalah/084.pdf.

menginjak 30 tahun di Indonesia dan memerlukan waktu yang lebih panjang untuk memperoleh keuntungan baik dunia maupun akhirat.

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hikmah dan Lestari yang menemukan bahwa kinerja sosial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROE.[65]

2. Pengaruh komposisi dana pihak ketiga terhadap kinerja sosial pada perbankan syariah.

Hasil *direct effect test* menunjukkan nilai $t_{hitung} < 1{,}96$ serta probabilitas < 5%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh kinerja sosial terhadap komposisi dana pihak ketiga perbankan syariah di Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Primayanti dan Marito yang menyatakan bahwa Qard atau Dana Kebajikan tidak berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Artinya, penyaluran dana sosial tidak dapat meningkatkan skala pelaksanaan kegiatan sosial sehingga keberadaan bank syariah di Indonesia tidak memberikan dampak yang signifikan tyerhadap masyarakat yang lebih luas, khususnya masyarakat Muslim.

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian Priambodo menyatakan bahwa kinerja sosial berpengaruh positif terhadap DPK.. Hasil penelitian ini juga bertentanga dengan hasil penelitian yang

[65]Ichwan Sidik dan Reskino, "Pengaruh Zakat dan ICSR terhadap Reputasi dan Kinerja," *SimposiumNasionalAkuntansiXIX*,2016,http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA%20XIX%20(19)%20Lampung%202016/makalah/084.pdf.

dilakukan oleh Samina yang menunjukkan hasil adanya korelasi antara kinerja sosial dengan DPK.[66]

3. **Pengaruh kinerja keuangan terhadap komposisi dana pihak ketiga pada perbankan syariah.**

   Hasil *direct effect test* menunjukkan nilai t_{hitung} < 1,96 serta probabilitas < 5%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh komposisi dana pihak ketiga terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.

   Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Meilita yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara sumber dana pihak ketiga dengan profitabilitas. Hal ini dikarenakan kegiatan sosial perbankan syariah di Indonesia tidak dirasakan oleh nasabah yang menghimpun dananya di bank syariah. Kondisi ini dibuktikan pada beberapa bank syariah yang tidak menampilkan jumlah penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada laporan keuangannya dengan alasan bahwa penyaluran dana zakat dilakukan oleh BAZNAS Indonesia. Hal ini dicantumkan dalam laporan tahunan bank syariah di Indonesia.

4. **Komposisi dana pihak ketiga efektif memediasi pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah.**

   Hasil *direct effect test* menunjukkan nilai t_{hitung} < 1,96 serta probabilitas < 5%, maka dapat disimpulkan bahwa komposisi dana

[66]Quazi Sagota Samina, "Practice of Corporate Social Responsibility in Islamic Banks of Bangladesh," *World Journal of Social Sciences* 2, no. 6 (2012).

pihak ketiga tidak memediasi pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini juga dibuktikan dari hasil *Indirect Effect Test* menunjukkan nilai t_{hitung} < 1,96 serta probabilitas < 5%, maka dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung tidak terdapat pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.

Dana pihak ketiga tidak mampu memperkuat hubungan pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. Dalam hal ini bank syariah sebagai penerima titipan tidak dapat mengelola zakat memalui kinerja sosial yang dapat memberikan imbalan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangannya. Oleh karena itu, penting bagi perbankan syariah untuk melakukan penyaluran langsung dana sosial agar dapat memberikan bekas positif bagi masyarakat luas.

Hal ini tidak terlepas dari nilai *R Square* kinerja keuangan sebesar 0,104 atau 10,4% yang menjelaskan bahwa variabel kinerja sosial, komposisi DPK dan efek variabel intervening memberikan kontribusi sebesar 10,4% terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan sisanya 89,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian tentang pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan dengan komposisi dana pihak ketiga sebagai variabel *intervening*

dilaksanakan dengan langkah-langkah yang disusun sedemikian rupa agar dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian, tidak mudah dalam prosesnya untuk mencapai hasil yang baik, Keterbatasan yang peneliti temukan selama penelitian dari penyusunan artikel ini adalah:

1. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman penulis yang belum tercapai selama penelitian ini.
2. Keterbatasan isi berupa buku referensi yang diperlukan untuk penelitian ini menimbulkan masalah bagi peneliti teoritis.
3. Keterbatasan metode yang digunakan masih dalam tahap analisis jalur.
4. Peneliti dibatasi untuk menggabungkan variabel penelitian ini dengan variabel lain.
5. Peneliti dibatasi hanya untuk mempertimbangkan sejauh mana risiko dan dampaknya terhadap perbankan dan perekonomian Indonesia.

Namun demikian, peneliti selalu berusaha agar kesalahan-kesalahan yang terjadi tidak mengurangi tujuan dari penelitian ini, akhirnya dengan segala usaha, usaha dan bantuan dari semua pihak, penelitian ini dapat diselesaikan. Peneliti berharap dengan mengadakan penelitian lebih lanjut, dapat memperbaiki segala kekurangan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan uji Direct Effect dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja sosial tidak terdapat pengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. Begitupun dengan hasil *Indirect Effect Test* menunjukkan nilai $t_{hitung} < 1{,}96$ serta probabilitas < 5%, .
2. Berdasarkan uji Direct Effect dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja sosial tidak terdapat pengaruh terhadap komposisi dana pihak ketiga perbankan syariah di Indonesia. Begitupun dengan hasil *direct effect test* menunjukkan nilai $t_{hitung} < 1{,}96$ serta probabilitas < 5%, .
3. Berdasarkan uji Direct Effect dapat disimpulkan bahwa variabel komposisi dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Hasil *direct effect test* menunjukkan nilai $t_{hitung} < 1{,}96$ serta probabilitas < 5%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh komposisi dana pihak ketiga terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.
4. Berdasarkan Hasil *direct effect test* menunjukkan nilai $t_{hitung} < 1{,}96$ serta probabilitas < 5%, maka dapat disimpulkan bahwa komposisi dana pihak ketiga tidak memediasi pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini juga dibuktikan dari hasil *Indirect Effect Test* menunjukkan nilai $t_{hitung} < 1{,}96$ serta probabilitas < 5%, maka

dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung tidak terdapat pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Bagi peneliti, Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan dibidang Perbankan dengan judul Pengaruh Kinerja Sosial Terhadap Kinerja Keuangan dengan Komposisi Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Intervening.
2. Bagi universitas, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi acuan untuk penelitian selanjutnya, penelitian terdahulu, serta sebagai karya ilmiah yang dapat dimanfaatkan. Agar penelitian ini relevan, dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah objek yang lebih luas.
3. Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Hendaknya harus dapat mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada kekurangan ataupun kelemahan Bank dalam menjalankan bisnis.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini periode yang digunakan terbatas pada tahun 2021, hendaknya penelitian selanjutnya lebih memperbaharui dan menambah periode penekitian agar hasil yang didapat lebih relevan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiningrum, Riski. "Analisis Pengaruh CAR, NPL, dan LDR Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan." *E-Jurnal Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 2, no. 8 (2013): 885–902.

Amirah, dan Teguh Budi Raharjo. "PENGARUH ALOKASI DANA ZAKAT

TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH." *Proceeding Call for Syariah Paper*, 2014. http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/per/article/download/369/366.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah : dari teori ke praktik*. 1 ed. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Dusuki, Asyraf Wajdi, dan Humayon Dar. "Stakeholders' Perceptions of Corporate Social Responsibility of Islamic Banks: Evidence from Malaysian Economy," 2005, 30.

Firmansyah, Irman. "DETERMINANT OF NON PERFORMING LOAN: THE CASE OF ISLAMIC BANK IN INDONESIA." *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 17, no. 2 (29 Januari 2015): 241–58. https://doi.org/10.21098/bemp.v17i2.51.

Hair, Joseph F. *Multivariate Data Analysis*. Eighth edition. Andover, Hampshire: Cengage, 2019.

Hamdani. *Good Corporate Governance: Tinjauan Etia dan Praktik Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2005.

Hikmah, Faiqotul. "PENGARUH KINERJA SOSIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN KOMPOSISI DPK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Houssem Eddine Bedoui. "Shari'a-based ethical performance measurement framework," 2012. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18433.66401.

Hutagalung, Muhammad Wandisyah R. "Pengaruh Non Performing Financing Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Return On Asset Dimoderasi Oleh

Variabel Inflasi." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 7, no. 1 (2019). https://doi.org/10.24952/masharif.v7i1.1702.

Ibrahim, Shahul Hameed Bin Mohamed, Ade Wirman, Bakhtiar Alrazi, Mohd Nazli Bin Mohd Nor, dan Sigit Pramono. "Alternative Disclosure & Performance Measures." *Department Of Accounting International Islamic University Malaysia*, 2004, 37.

Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2008.

———. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Jumingan. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

———. *Dasar- Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

———. *Manajemen Perbankan*. Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Kholil, Syukur. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Citapustaka Media, 2006.

Kuncoro, Mudrajat. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2009.

Mubarak, Darihan, Sigit Pramono, dan Ai Nur Bayinah. "Pengungkapan Kinerja Sosial Perbankan Syariah di Indonesia." *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN ISLAM* 7, no. 1 (26 Juni 2019): 37–58. https://doi.org/10.35836/jakis.v7i1.65.

Nofinawati. "PENGARUH INFLASI, BI RATE, DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DANA PIHAK KETIGA (DPK) PADA PERBANKAN SYARIAH INDONESIA TAHUN 2012-2017." *Jurnal Riset Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2018). http://dx.doi.org/10.31958/imara.v2i2.1252.

Priambodo, Luthfi Azhar. "PENGARUH PENGELUARAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP DANA PIHAK KETIGA, JUMLAH PEMBIAYAAN, DAN PROFITABILITAS," t.t., 10.

Rangkuti, Ahmad Nizar. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 2016.

Rina, Dewi, dan Ratna Puspita Sari. "Kinerja Keuangan Vs Kinerja Sosial; Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, t.t.

Samina, Quazi Sagota. “Practice of Corporate Social Responsibility in Islamic Banks of Bangladesh.” *World Journal of Social Sciences* 2, no. 6 (2012).

Sartono, Agus. *Manajemen Keuangan Teori Dan Aplikasi*. 4 ed. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al- Misbah: Pesan dan Kesan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sidik, Ichwan, dan Reskino. “Pengaruh Zakat dan ICSR terhadap Reputasi dan Kinerja.” *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 2016. http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA%20XIX%20(19)%20Lampung%202016/makalah/084.pdf.

Simorangkir, O. P. *Seluk beluk Bank Komersial*. 5 ed. Jakarta: Persada Indonesia, 2004.

Siregar, Budi Gautama, Nurul Izzah, dan Damri Batubara. “The Effect Of Inflation Level And Bi-7 Day Repo Rate On Mudhrabah Deposits In Sharia Commercial Banks Period 2017-2019.” *JIFTECH* 1, no. 1 (2022). http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/jiftech/article/view/5020.

Soemitra, Andri. *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Solihin, Ismail. *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Sugiyono, Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Undang-Undang Perbankan. “Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.” Republik Indonesia, 2008.

UU No. 10 Tahun 1998. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN.” Republik Indonesia, 1998. https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf.

Virgowati. “ANALISIS KINERJA SOSIAL PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, dan Muamalat Indonesia).” ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

Yaya, Rizal. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer berdasarkan PAPSI 2013*. 2 ed. Jakarta: Salemba Empat, 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Feby Rahayu Damayanty

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, tanggal lahir : Padangsidimpuan, 26 Februari 2000

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Anak ke : 2 (satu) dari 3 bersaudara

Alamat Lengkap : Ujung Padang, Jln. Kenanga, Gg. H. Sutan Siregar, No. 7

Telepon/No. HP : 0822-8676-8460

Email : febyrahayu935@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama Orang Tua

Ayah : Suriatno

Ibu : Komariah Siregar

Alamat : Ujung Padang, Jln. Kenanga, Gg. H. Sutan Siregar, No. 7

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Wiraswasta

Ibu : Ibu Rumah Tangga

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2006-2012 : SD Negeri 200281 Padangsidimpuan

Tahun 2012-2015 : SMP Negeri 2 Padangsidimpuan

Tahun 2015-2018 : SMK Negeri 1 Padangsidimpuan

Tahun 2016-2020 : Program Sarjana (S1) Perbankan Syariah UIN SYAHADA

LAMPIRAN 1

Perhitungan Laporan Keuangan Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Tahun 2021

No	Nama Bank Umum Syariah	Tahun	Tabungan
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	2021	1.603.300.000.000
2	PT. Bank Victoria Syariah	2021	2.025.100.000.000
3	PT. Bank Syariah Indonesia	2021	9.993.877.000.000
4	PT. Bank Jabar Banten Syariah	2021	2.263.564.000.000
5	PT. Bank Mega Syariah	2021	4.551.800.000.000
6	PT. Bank Panin Syariah	2021	8.420.530.000.000
7	PT. Bank BCA Syariah	2021	1.373.000.000
8	PT. Bank Maybank Syariah	2021	1.148.988.000.000
9	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	2021	4.551.800.000.000
10	PT. Bank Permata, Tbk	2021	4.450.267.000.000
11	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	2021	1.715.260.000.000
12	PT. Bank Sinarmas	2021	1.037.482.000.000
13	PT. BPD DKI	2021	11.884.470.000
14	PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	2021	788.131.358.856
15	PT. BPD Jawa Tengah	2021	23.817.894 .000
16	PT. Bank Aceh	2021	2.986.240.000.000
17	PT. BPD Sumatera Utara	2021	10.997.051 .000
18	PT. BPD Sumatera Barat	2021	7.035.981.329.083
19	PT. BPD Kalimantan Selatan	2021	2.263.564.000.000
20	PT. BPD Nusa Tenggara Barat	2021	76.706.722 .000

Perhitungan Laporan Keuangan Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Tahun 2021

No	Nama Bank Umum Syariah	Tahun	Zakat
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	2021	8.196.858
2	PT. Bank Victoria Syariah	2021	2.600.00
3	PT. Bank Syariah Indonesia	2021	12.761.000
4	PT. Bank Jabar Banten Syariah	2021	9.893.000
5	PT. Bank Mega Syariah	2021	4.250.000
6	PT. Bank Panin Syariah	2021	6.510.000
7	PT. Bank BCA Syariah	2021	70.074.288
8	PT. Bank Maybank Syariah	2021	2.122.597
9	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	2021	1.830.000
10	PT. Bank Permata, Tbk	2021	6.939.000
11	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	2021	526.000
12	PT. Bank Sinarmas	2021	146.000
13	PT. BPD DKI	2021	33.000
14	PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	2021	5.768.000
15	PT. BPD Jawa Tengah	2021	25.128.845
16	PT. Bank Aceh	2021	1.250.500
17	PT. BPD Sumatera Utara	2021	30.000
18	PT. BPD Sumatera Barat	2021	11.000
19	PT. BPD Kalimantan Selatan	2021	6.082.000
20	PT. BPD Nusa Tenggara Barat	2021	77.096.340